

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
BANK INDONESIA PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

ILHAM MAULANA

NIM: E20172152

Dosen Pembimbing:

Dr. Khairunnisa Musari, M.MT

NIP. 197810032015032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
BANK INDONESIA PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

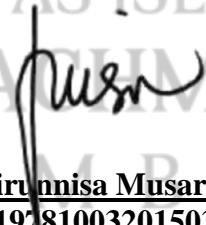
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

ILHAM MAULANA
NIM: E20172152

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Khairunnisa Musari, M.MT
NIP. 197810032015032001

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
BANK INDONESIA PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

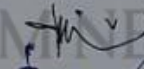
M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I

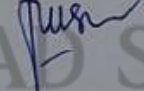
NIP. 197608122008011015

Nur Hidayat, SE., MM.

NUP. 201603132

Anggota:

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., M.El ()

2. Dr. Khairunnisa Musari, M.MT ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

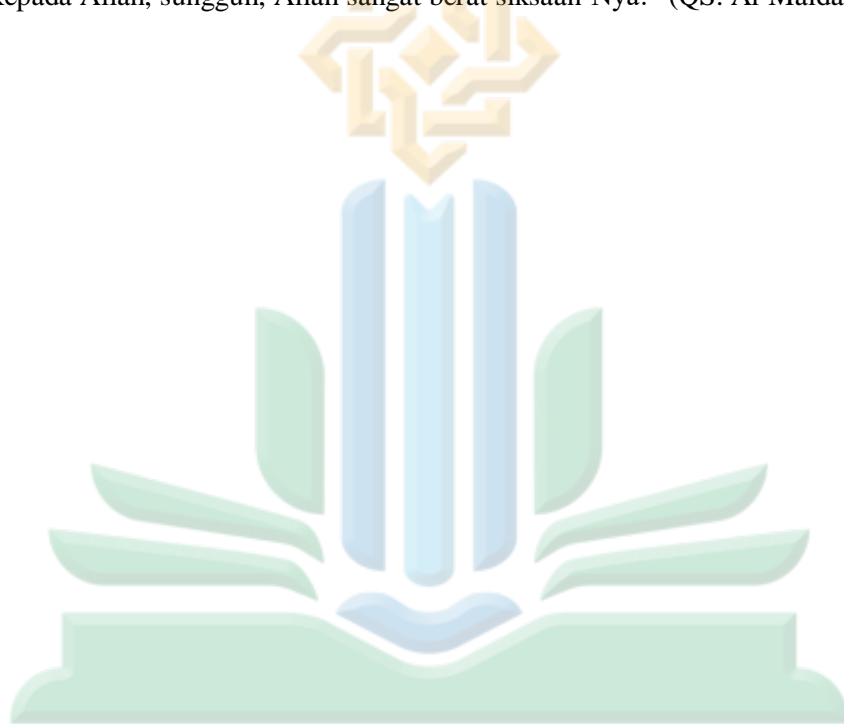


Dr. Muhammad Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 5:2.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya tercinta yang telah membimbing dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Keluarga besar saya yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang tidak pernah padam kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bank Indonesia, Yukbisnis, GenBI Jember, dan UMKM yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan saya melakukan penelitian disana, serta memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian.
4. Keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq.
5. Almamater saya Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan secara lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak, amin.

Setelah melalui proses yang panjang, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu. Terelesaiannya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka sepatasnya peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, M.MT. selaku Dosen yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Masrohatin, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam kegiatan akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
7. Seluruh Civitas Akademika UIN KHAS Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.

Tidak ada kata yang peneliti ucapkan selain do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah yang maha kuasa memberi balasan kebaikan pada semua jasa yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Iham Maulana, Dr. Khairunnisa Musari, M.MT, 2022: *Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember.*

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan. Dalam meningkatkan akses keuangan UMKM, Bank Indonesia mendukung melalui sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis, termasuk memfasilitasi temu bisnis antara bank dengan UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan. Dari sisi penawaran, Bank Indonesia menetapkan peraturan tentang rasio kredit UMKM dalam PBI No. 17/12/PBI/2015, yaitu bank umum wajib mengalokasikan sebesar minimum 20% dari total kredit untuk UMKM.

Penelitian ini ingin mengetahui beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember?; (2) Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember?.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember; (2) Mengetahui efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil yaitu: (1) Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jember sudah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa variabel yaitu: bentuk komitmen antarorganisasi berupa komitmen tertulis, koordinasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan, adanya kemampuan Yukbisnis dan GenBI Jember dalam menjalankan perannya sebagai *implementor*, kemudian adanya respon positif dan negatif yang ditunjukkan oleh UMKM; (2) Implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jember sudah efektif. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran sudah tercapai, sosialisasi program sudah dilakukan, tujuan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, serta pengawasan sudah dilaksanakan oleh Bank Indonesia beserta *stakeholder*.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Kebijakan Makroprudensial, UMKM.

ABSTRACT

Ilham Maulana, Dr. Khairunnisa Musari, M.MT, 2022: *The Effectiveness of Bank Indonesia's Macroprudential Policy Implementation on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jember Regency.*

Bank Indonesia's macroprudential policy on the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is an endeavor to assist MSMEs' development through macroprudential policies, particularly boosting the intermediation role and improving access to finance. Bank Indonesia facilitates MSME financial access on both the supply and demand sides. On the demand side, Bank Indonesia offers technical help, such as coordinating business meetings between banks and MSMEs in order to enhance access to capital. From the supply side, Bank Indonesia mandates MSME loan ratio regulations in PBI No. 17/12/PBI/2015, stating that commercial banks must allocate a minimum of 20% of total loans to MSMEs.

This research aims to answer two questions: (1) How effective is Bank Indonesia's macroprudential policy implementation on the development of MSMEs in Jember Regency?; (2) How effective is Bank Indonesia's macroprudential policy implementation on the development of MSMEs in Jember Regency?.

The objectives of this research are to: (1) determine the effectiveness of Bank Indonesia's macroprudential policies on the growth of MSMEs in Jember Regency; (2) determine the effectiveness of Bank Indonesia's macroprudential policies on the development of MSMEs in Jember Regency.

The research method employed in this study is a qualitative approach with a descriptive research design. Observation, interviews, and documentation are used as data collection approaches. A descriptive qualitative analysis was utilized to analyze the data. The researchers employed source triangulation to verify the data's accuracy.

The following are the findings of the research: (1) Bank Indonesia's macroprudential policies in establishing MSMEs in Jember Regency have been properly implemented. This can be seen in numerous aspects, including inter-organizational commitment in the form of written commitments, coordination in the form of meetings, Yukbisnis and GenBI Jember's ability to carry out their duties as implementers, and SMEs' positive and negative responses; (2) Bank Indonesia's macroprudential policies in the development of MSMEs in Jember Regency have been successful. This can be demonstrated in numerous measures, such as target accuracy, program socialization, objectives that are in line with what was set, and oversight by Bank Indonesia and stakeholders.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Macroprudential Policy, MSME.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian	69
C. Subjek Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Analisis Data.....	75
F. Keabsahan Data.....	77
G. Tahap-tahap Penelitian	78
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	79
A. Gambaran Objek Penelitian.....	79
B. Penyajian Data Dan Analisis	88
C. Pembahasan Temuan.....	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019	1
Tabel 1.2 Data Jumlah UMKM di Jawa Timur	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2.2 Perkembangan Pencapaian Rasio Kredit UMKM dan Jumlah Bank	60
Tabel 2.3 Penyebab Belum Tercapainya Rasio Kredit UMKM.....	61
Tabel 4.1 Tim Pendamping UMKM Yukbisnis	82
Tabel 4.2 Struktur Organisasi <i>Implementing Partner</i> GenBI Jember	83
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Afa Choco and Snack	84
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur	86
Tabel 4.5 Struktur Organisasi KSU Buah Ketakasi.....	87
Tabel 4.6 Komparasi Penelitian Terdahulu Dan Temuan di Lapangan.....	106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosiklisitas Siklus Keuangan dan Siklus Ekonomi	53
Gambar 4.1 Skema Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.....	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Ketahanannya dalam menghadapi sejumlah krisis ekonomi juga telah diuji, terutama ketika negara Indonesia dilanda krisis ekonomi (sejak Juli 1997).² Ketahanan ini antara lain karena UMKM yang tidak bergantung pada bahan baku impor atau modal asing sehingga ketika mata uang rupiah melemah mereka tidak terpengaruh. Selain itu kinerja UMKM dinilai sangat baik dalam hal produktifitas tenaga kerja, mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, serta memiliki sifat yang lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan.³ Sebagian besar pelaku UMKM menawarkan produk dan jasa dengan harga yang murah, dengan demikian ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat karena adanya krisis, UMKM justru mendapatkan efek positif.

Tabel 1.1
Tabel Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ^{*)}		TAHUN 2019 ^{**)}		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1.98

Bersambung...

² Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4 No. 2 (2019), 139.

³ Ibid., 139.

Sambungan...

	A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) B. Usaha Besar (UB)		64.194.057 63.350.222 783.132 60.702 5.550	99.99 98.68 1.22 0.09 0.01	65.465.497 64.601.352 798.679 65.465 5.637	99.99 98.67 1.22 0.10 0.01	1.271.440 1.251.130 15.547 4.763 87	1.98 1.97 1.99 7.85 1.58
2	TENAGA KERJA (A+B) A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	120.598.138 116.978.631 107.376.540 5.831.256 3.770.835 3.619.507	 97.00 89.04 4.84 3.13 3.00	123.368.672 119.562.843 109.842.384 5.930.317 3.790.142 3.805.829	 96.92 89.04 4.81 3.07 3.08	2.770.534 2.584.212 2.465.844 99.061 19.307 186.322	2.30 2.21 2.30 1.70 0.51 5.15
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) B. Usaha Besar (UB)	(Miliar Rupiah)	14.838.756.0 9.062.581.3 5.605.334.9 1.423.885.1 2.033.361.3 5.776.174.7	 61.07 37.77 9.60 13.70 38.93	15.832.535.4 9.580.762.7 5.913.246.7 1.508.970.1 2.158.545.8 6.251.772.7	 60.51 37.35 9.53 13.63 39.49	993.779.4 518.181.3 307.911.8 85.085.0 125.184.5 475.598.1	6.70 5.72 5.49 5.98 6.16 8.23
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B) A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) B. Usaha Besar (UB)	(Miliar Rupiah)	9.995.305.9 5.721.148.1 2.927.890.5 1.355.705.7 1.437.551.9 4.274.157.9	 57.24 29.29 13.56 14.38 42.76	12.309.904.8 7.034.146.7 3.701.368.0 1.536.961.1 1.795.817.7 5.275.758.1	 57.14 30.07 12.49 14.59 42.86	2.314.598.9 1.312.998.6 773.477.5 181.255.3 358.265.8 1.001.600.2	23.16 22.95 26.42 13.37 24.92 23.43
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B) A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) B. Usaha Besar (UB)	(Miliar Rupiah)	2.044.490.8 293.840.9 25.006.4 47.099.7 221.734.8 1.750.649.9	 14.37 1.22 2.30 10.85 85.63	2.167.079.7 339.190.5 30.289.7 56.407.4 252.493.4 1.827.889.2	 15.65 1.40 2.60 11.65 84.35	122.589.0 45.349.6 5.283.3 9.307.7 30.758.6 77.239.3	6.00 15.43 21.13 19.76 13.87 4.41
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) A. UMKM - Usaha Mikro (UMi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM)	(Miliar Rupiah)	4.244.685.6 2.564.549.5 290.840.2 996.666.1 1.277.043.2	 60.42 6.85 23.48 30.09	4.363.262.0 2.619.382.0 294.418.5 1.018.939.6 1.306.023.9	 60.03 6.75 23.35 29.93	118.576.4 54.832.5 3.578.3 22.273.4 28.980.7	2.79 2.14 1.23 2.23 2.27

Bersambung...

Sambungan...

	B. Usaha Besar (UB)		1.680.136.1	39.58	1.743.880.0	39.97	63.743.9	3.79
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)		3.051.731.2		3.166.958.0		115.226.8	3.78
	A. UMKM		1.675.139.6	54.89	1.716.750.0	54.21	41.610.4	2.48
	- Usaha Mikro (UMi)	(Miliar Rupiah)	206.233.6	6.76	218.370.6	6.90	12.137.0	5.89
	- Usaha Kecil (UK)		522.653.9	17.13	537.686.1	16.98	15.032.2	2.88
	- Usaha Menengah(UM)		946.252.1	31.01	960.693.3	30.33	14.441.2	1.53
	B. Usaha Besar (UB)		1.376.591.6	45.11	1.450.208.0	45.79	73.616.4	5.35

Keterangan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh penulis

Merujuk data Kementerian Koperasi dan UMKM⁴, jumlah unit usaha yang termasuk dalam kategori UMKM hingga tahun 2019 masih dominan. Jika jumlah UMKM mencapai 65.465.497 unit usaha, maka jumlah usaha besar hanya sebanyak 5.637 unit. Demikian juga dengan kemampuan untuk menampung jumlah tenaga kerja. Unit usaha besar mempekerjakan pegawai sebesar 3.805.829 tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang bekerja untuk sektor UMKM mencapai 119.562.843. Data tersebut menunjukkan dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, 96,92% diantaranya bekerja untuk sektor UMKM. Sedangkan apabila melihat dari komposisi terhadap PDB harga berlaku, sektor UMKM menyumbang sebesar 60,51% sisanya yaitu sebesar 39,49% merupakan sumbangsih dari sektor usaha besar. Jika melihat dari sisi ekspor non migas yang dilakukan oleh UMKM, maka proporsi mereka sebesar 15,65% dan sebanyak 84,35% ekspor non migas dilakukan oleh usaha besar.

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> (22 Juni 2021).

UMKM memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat mengalami krisis, UMKM berperan positif dalam membantu pemulihan ekonomi, terlihat dengan kemampuannya menyerap 96,92% tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,03%.⁵ Selain itu, UMKM juga berdampak sosial bagi masyarakat dalam mengatasi minimnya pendapatan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Beck, Demirguc-Kunt dan Levine dapat diambil kesimpulan bahwasanya ada pengaruh yang cukup signifikan dan positif dari UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan penelitian terhadap 45 negara di dunia.⁶

Peranan penting lainnya bagi UMKM adalah merangsang munculnya wirausahawan baru. Kewirausahaan memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu makro dan mikro. Secara makro, kewirausahaan berperan sebagai pendorong, pengendali dan penggerak perekonomian negara. Setiap usaha, baik itu usaha yang berskala besar maupun UMKM dimulai dari ide-ide kreatif yang diimplementasikan oleh wirausahawan. Pada UMKM, fungsi ini dapat memudahkan untuk memasuki industri serta memungkinkan untuk bergerak lebih cepat. Ide-ide kreatif dan inovatif lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan usaha besar, karena pada umumnya usaha besar memiliki jalur dan prosedur birokrasi yang lebih rumit. Di sisi mikro, fungsi wirausahawan di perusahaan mencakup menanggung risiko dan

⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019", <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> (04 Juli 2022).

⁶ Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt, dan Ross Levine, "SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence", *Journal of Economic Growth*, Vol. 10 No. 3 (2005), 199-229.

ketidakpastian, menggabungkan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan peluang baru.⁷ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati juga sampai pada kesimpulan yang kurang lebih sama. Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang penting dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM.⁸

Meskipun pemerintah menyadari pentingnya peran dan fungsi UMKM itu cukup signifikan, namun sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang dihadapi UMKM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal UMKM itu sendiri.⁹ Dari sisi internal faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor penghambatnya adalah iklim usaha yang tidak sepenuhnya kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, implikasi otonomi daerah, sifat produk yang berumur pendek, akses pasar yang terbatas dan implikasi perdagangan bebas.

Upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan. Dalam meningkatkan akses keuangan UMKM, Bank Indonesia mendukung melalui sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia

⁷ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 32.

⁸ Ernani Hadiyati, "Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 1 (Maret, 2011), 8.

⁹ Yuvensius Sri Susilo, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 14 No. 3 (September, 2010), 467.

memberikan bantuan teknis, termasuk memfasilitasi temu bisnis antara bank dengan UMKM untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Selain itu, melalui Kantor Perwakilan di daerah, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan model bisnis guna mendorong akses pembiayaan UMKM. Dari sisi penawaran, secara nasional Bank Indonesia telah menetapkan salah satu peraturan tentang rasio kredit UMKM sebagaimana diatur dalam PBI No. 17/12/PBI/2015, yaitu bank umum wajib mengalokasikan sebesar minimum 20% dari total kredit untuk UMKM baik berupa kredit langsung, maupun kredit tidak langsung melalui *executing*, *channeling*, dan *sindikasi*.¹⁰

Wilayah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jember. Jember merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di dalam Provinsi Jawa Timur. Pemilihan wilayah ini berdasarkan banyaknya jumlah UMKM, menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Jember sebanyak 647.416 UMKM, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur.¹¹

Tabel 1.2
Data Jumlah UMKM di Jawa Timur

No	Nama Daerah	Jumlah UMKM	No	Nama Daerah	Jumlah UMKM
1	Pacitan	212.197	20	Magetan	181.760
2	Ponorogo	283.967	21	Ngawi	253.870
3	Trenggalek	246.614	22	Bojonegoro	376.316
4	Tulungagung	288.371	23	Taban	319.477

¹⁰ Bank Indonesia, “*Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*”, 118.

¹¹ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, “Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2018”, <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm> (22 Juni 2021).

5	Blitar	373.447	24	Lamongan	312.376
6	Kediri	380.056	25	Gresik	225.242
7	Malang	600.054	26	Bangkalan	248.664
8	Lumajang	287.778	27	Sampang	229.644
9	Jember	647.416	28	Pamekasan	247.269
10	Banyuwangi	480.687	29	Sumenep	401.210
11	Bondowoso	271.793	30	Kota Kediri	45.629
12	Situbondo	217.042	31	Kota Blitar	29.123
13	Probolinggo	333.453	32	Kota Malang	117.840
14	Pasuruan	362.230	33	Kota Probolinggo	43.478
15	Sidoarjo	248.306	34	Kota Pasuruan	35.596
16	Mojokerto	216.518	35	Kota Mojokerto	18.995
17	Jombang	299.273	36	Kota Madiun	36.555
18	Nganjuk	288.119	37	Kota Surabaya	385.054
19	Madiun	191.880	38	Kota Batu	44.963

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 dan diolah oleh penulis

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme dan seberapa tinggi tingkat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, maka disusunlah rencana penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam

bentuk kalimat tanya.¹² Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³ Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berguna jika dapat bermanfaat bagi banyak pihak, manfaat tersebut bisa bersifat teoretis dan praktis. Manfaat penelitian yang bersifat teoretis berguna untuk pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis berguna untuk memecahkan masalah.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

¹³ *Ibid.*, 45.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

supaya menjadi khazanah keilmuan masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam memahami tentang efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM, serta dapat menambah wawasan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1) Penelitian ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS), Jember.

2) Memperluas wawasan penulis terkait paradigma perkembangan UMKM di Kabupaten Jember.

3) Membuka pengetahuan penulis menyangkut usaha-usaha ataupun strategi-strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakannya dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jember.

b. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

1) Menjadi indikator dalam usaha mengembangkan UMKM serta pemilihan kebijakan bagi Bank Indonesia.

- 2) Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam mengevaluasi program yang dikeluarkan kepada para pelaku UMKM oleh Bank Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai referensi dan kontrol dari kegiatan pemerintah/instansi terkait dalam pengembangan UMKM yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai kebijakan untuk pengembangan UMKM.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hal yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.¹⁶ Menurut Ravianto dalam Masruri, mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini

¹⁵ Penyusun, *Pedoman*, 45.

¹⁶ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 429.

menunjukkan bahwa sebuah tindakan dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitasnya.¹⁷ Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud yaitu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode penelitian Januari-Februari 2022.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap selesai. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Yang dimaksud implementasi pada penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pusat sebagai regulator dan Bank Indonesia Jember sebagai eksekutor dari regulasi Bank Indonesia Pusat, yaitu berupa pelaksanaan kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan.¹⁹ Ruang lingkup implementasi pada penelitian ini tidak hanya sebatas perencanaan saja namun hingga eksekusi kebijakan selama periode penelitian Januari-Februari 2022.

¹⁷ Masruri dan Imam Muazansyah, "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2017), 366.

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

¹⁹ Bank Indonesia, *Laporan*, 118.

3. Kebijakan Makroprudensial

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Bank for International Settlements (BIS), Swiss, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik. Sementara itu, badan yang bertanggungjawab untuk mengawasi sistem keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya risiko sistemik pada sistem keuangan Eropa yaitu European Systemic Risk Board (ESRB) menggambarkan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan dengan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mengurangi akumulasi risiko sistemik, sehingga dapat menjamin keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. IMF memberikan interpretasi serupa, mendefinisikan makroprudensial sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan dengan membatasi risiko sistemik.²⁰ Mengacu pada beberapa definisi di atas, kebijakan makroprudensial secara konseptual merupakan instrumen regulasi prudensial yang mempunyai tujuan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan individu lembaga keuangan.²¹

Dalam penelitian ini, kebijakan makroprudensial yang akan diteliti yaitu peningkatan akses keuangan UMKM, yang mana peningkatan

²⁰ Departemen Kebijakan Makroprudensial, *Mengupas Kebijakan Makroprudensial* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 2.

²¹ Perry Warjiyo, dan Solikin M. Juhro, *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 604.

tersebut dilakukan melalui sisi permintaan maupun sisi penawaran selama periode penelitian Januari-Februari 2022. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, baik itu dalam bentuk pelatihan wacana (*knowledge based training*) maupun pelatihan keterampilan (*skill based training*), pada pelatihan ini Bank Indonesia memberikan edukasi terkait dengan peningkatan produksi, memperluas akses pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan UMKM. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga memfasilitasi UMKM dalam pembentukan manajemen usaha, peralatan produksi, serta temu bisnis antara bank dengan UMKM untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Dari sisi penawaran, secara nasional Bank Indonesia telah menetapkan salah satu peraturan tentang rasio kredit UMKM sebagaimana diatur dalam PBI No. 17/12/PBI/2015, yaitu bank umum wajib mengalokasikan sebesar minimum 20% dari total kredit untuk UMKM baik berupa kredit langsung, maupun kredit tidak langsung melalui *executing*, *channeling*, dan *sindikasi*.²² Pada tahun 2019 rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan sebesar 20,46% namun pada periode penelitian Januari-Februari 2022 jumlah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mengalami kenaikan hingga 21,17%.²³ Mengacu pada peraturan tersebut, UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan untuk mengembangkan usahanya dengan syarat mempunyai laporan keuangan yang baik, dimana laporan keuangan

²² Bank Indonesia, *Laporan*, 118.

²³ Bank Indonesia, “Perkembangan Pencapaian Rasio Kredit UMKM Triwulan I 2022”, <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/default.aspx>. (4 Juli 2022)

tersebut menjadi alat utama perbankan menilai kelayakan pembiayaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, maka Bank Indonesia memberikan bantuan terhadap UMKM melalui sisi permintaan yaitu berupa bantuan teknis.

4. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah lembaga publik yang independen, bank sentral Republik Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam maupun luar wilayah negara. Modal Bank Indonesia ditetapkan minimal sebesar 10% dari seluruh kewajiban moneter ditambah Rp2.000.000.000.000,00, yang dananya diperoleh dari cadangan umum atau sumber pendanaan lainnya. Bank Indonesia juga merupakan lembaga berbadan hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁴

Dalam penelitian ini, Bank Indonesia yang dimaksud adalah Bank Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebagai regulator dan Bank Indonesia Jember sebagai eksekutor dari regulasi Bank Indonesia Pusat.

5. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

²⁴ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), 243.

Sebagai aturan umum, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), penjualan rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga indikator tersebut berbeda menurut negara. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkan pentingnya dan peran UMKM antar negara.²⁵ Dalam penelitian ini UMKM yang akan diteliti yaitu UMKM yang pernah atau sedang mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia Jember selama periode penelitian Januari-Februari 2022.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal pembahasan agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan supaya susunannya lebih sistematis, maka perlu memberikan gambaran sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan pembahasan.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

²⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁶

Adapun beberapa kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Cut Leni Narisyah, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap Program UMKM untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.²⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan dampak bantuan CSR yang diberikan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh kepada UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat disekitarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan

²⁶ Penyusun, *Pedoman*, 45.

²⁷ Cut Leni Narisyah, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap Program UMKM untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer berupa wawancara dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan UMKM. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian data tersebut dikelompokkan dan disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan baik serta berpengaruh terhadap program UMKM untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan yaitu pengaruh program CSR, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

2. Fahrudin, "Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung terhadap Perkembangan UMKM menurut Perspektif Ekonomi Islam". Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi program kluster ini bermanfaat terhadap upaya pengembangan usaha pengolahan ikan teri di Pulau Pasarang sebagai kluster mandiri. Hasil dari program pengembangan kluster yang disusun oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung apabila dilihat dari objek penelitian sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan tahapan sebagai upaya pengembangan usaha. Tahapan yang dimulai dari fase survei sampai tahapan *passing out* sudah berjalan yang di dalamnya terdapat serangkaian pelatihan dan pendampingan kluster dalam masa program kluster berjalan sehingga dampak positif kian terasa oleh pengelola di masing-masing kelompok mulai dari jumlah produksi, pendapatan, permodalan dan tenaga kerja mengalami peningkatan, dan seluruhnya itu merupakan indikator perkembangan ekonomi. Pelaksanaan program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang menganggap kemandirian sebagai tujuan utama bisnis, bermusyawarah dalam melakukan perbaikan serta berinovasi terus-menerus agar usahanya tetap bisa bertahan mengikuti perkembangan jaman dan hal ini sejalan dengan hukum Al-Qur'an dan Hadis yang di jadikan landasan ekonomi islam tak terkecuali dalam hal mengembangkan usaha.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan

²⁸ Fahrudin, "Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan yaitu analisis peran program UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan yaitu efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

3. Sri Maryati, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat”. Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.²⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BPRS dalam pengembangan UMKM pada umumnya dan agribisnis pedesaan khususnya di wilayah Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi UMKM, hal ini memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Pelaku usaha juga harus berusaha untuk menjalankan usahanya secara lebih profesional dan memenuhi aspek legalitas usaha untuk memudahkan pemerintah maupun lembaga keuangan dalam melakukan upaya pemberdayaan dan dukungan permodalan. Sampai tahun 2012, di wilayah Sumatera Barat

²⁹ Sri Maryati, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat”, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 3 No. 1 (2014), 1.

hanya terdapat 7 BPRS yang terdiri dari 7 kota dan 12 Kabupaten, untuk itu perlu didorong penambahan BPRS agar layanan perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, demikian juga dengan jangkauan layanan untuk UMKM di wilayah ini. Selain itu, BPRS juga dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro formal di daerah ini.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan pada penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu UMKM di Kabupaten Jember.

4. Dwi Indri Novianti, “Analisis Indeks Harga Properti Resedensial (IHPR), Suku Bunga Kredit, dan Instrumen Makroprudensial *Loan To Value* terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Periode 2012-2019”. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.³⁰

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh indeks harga properti residensial, suku bunga KPR, dan ketentuan *loan to value* (LTV) terhadap distribusi KPR di Indonesia. Variabel independen dalam

³⁰ Dwi Indri Novianti, “Analisis Indeks Harga Properti Resedensial (IHPR), Suku Bunga Kredit, dan Instrumen Makroprudensial *Loan To Value* Terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Periode 2012-2019” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020).

penelitian ini menggunakan variabel indeks harga properti residensial, suku bunga KPR, dan *dummy* variabel LTV penyaluran KPR sebagai variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data regresi linear dan triwulan *time series* dari tahun 2012:3 hingga 2019:4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks harga properti residensial berpengaruh positif juga signifikan terhadap distribusi KPR, sedangkan suku bunga KPR dan LTV memiliki pengaruh negatif juga signifikan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KPR. Berdasarkan temuan tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan *review* ulang terhadap LTV agar setiap pengetatan atau pelonggaran yang dilakukan dapat memberikan dampak yang baik dan optimal bagi sektor KPR.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, namun pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat perbedaan dalam instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan, pada penelitian terdahulu instrumen yang digunakan yaitu LTV, sedangkan pada penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu rasio kredit UMKM.

5. Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, “Risiko Kredit dan Kebijakan Makroprudensial Perbankan di Indonesia: Pendekatan Makro Stress-Testing (Periode 2009:Q1-2017:Q4)”. Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.³¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik siklus kredit di Indonesia dan mengidentifikasi variabel makro yang dapat mempengaruhi risiko kredit perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis siklus bisnis dan siklus kredit di Indonesia pada tahun 2003-2017 dan analisis kebijakan makroprudensial dengan menggunakan pendekatan *stress-testing*. Sedangkan metode yang digunakan dalam analisis siklus bisnis dan siklus kredit adalah *frequency based filter analysis*, sedangkan pada analisis makro *stress-testing* dengan pendekatan *vector error correction mechanism* (VECM).

Kesimpulan dari hasil siklus bisnis dan siklus kredit adalah bahwa siklus kredit memiliki periode ekspansi dan kontraksi lebih lama dari siklus bisnis, yaitu durasi kontraksi siklus kredit sebesar 14 kuartal dan durasi ekspansi sebesar 18,5 kuartal sedangkan siklus bisnis memiliki durasi kontraksi sebesar 9 kuartal dan ekspansi sebesar 5,8 kuartal. Pada analisis makro *stress-testing* menunjukkan bahwa variabel M1 dan kurs berpengaruh signifikan terhadap kenaikan NPL pada perbankan di

³¹ Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, “Risiko Kredit Dan Kebijakan Makroprudensial Perbankan Di Indonesia: Pendekatan Makro Stress-Testing (Periode 2009:Q1-2017:Q4)” (Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019).

Indonesia, hal ini dibuktikan dengan peningkatan standar deviasi membuat respon NPL terhadap kedua variabel tersebut meningkat tajam. Sedangkan pada analisis *scenario test* menunjukkan, bahwa ambang batas atas untuk NPL adalah sebesar 3,94 dan ambang batas bawah sebesar 2,49.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang makro *stress testing* dengan pendekatan skenario *stress testing*, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

6. Aliya Khairunnisa, “Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah”. Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.³²

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan UMKM di Palangkaraya secara umum masih mengalami berbagai permasalahan, masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pertumbuhan UMKM diantaranya masalah permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, masalah pemasaran, masalah perizinan, terbatasnya sarana prasarana serta rendahnya minat beli masyarakat.

³² Aliya Khairunnisa, “Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2018).

Kedua, Bank Sentral tentunya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Palangkaraya melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Pertumbuhan UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan: a) Permodalan; b) Pendidikan atau pelatihan; c) *Controlling* atau pengawasan; d) *Packaging* atau pengemasan; e) *Marketing* atau pemasaran. Hasil yang diperoleh setelah adanya pemberdayaan UMKM tersebut, UMKM mengalami peningkatan pendapatan, produksi yang lebih tinggi serta keterampilan yang lebih baik.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan yaitu revitalisasi UMKM melalui PSBI KPwBI Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

7. Novrianti Putri Ardely, “Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti.³³

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam pengelolaan kredit properti.

³³ Novrianti Putri Ardely, “Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia” (Skripsi, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016).

Variabel independen yang digunakan meliputi variabel *dummy* LTV, suku bunga kredit konsumsi, produk domestik bruto, dan variabel interaksi dari LTV dengan suku bunga kredit konsumsi serta variabel terikatnya yaitu kredit properti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen kebijakan makroprudensial (LTV) efektif diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial (LTV) efektif mengontrol kredit properti. Kemudian secara bersamaan keempat variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap kredit properti dan secara parsial variabel suku bunga kredit konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit properti. Berdasarkan hasil uji koefisien integrasi, kemampuan variabel-variabel independen pada model dalam menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 62.68%.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Selain itu terdapat perbedaan pada instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan, pada penelitian terdahulu instrumen yang digunakan yaitu LTV, sedangkan pada penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu rasio kredit UMKM.

8. Aan Anisah, “Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial dalam mengurangi Risiko Kredit di Indonesia”. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.³⁴

Studi ini menganalisis efektivitas instrumen kebijakan makroprudensial yaitu LTV, Giro Wajib Minimum (GWM), dan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) dalam mengontrol pertumbuhan kredit. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel kinerja perbankan, serta pertumbuhan PDB dan suku bunga sebagai variabel makroekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari triwulan pertama pada tahun 2005 sampai dengan triwulan pertama pada tahun 2017 dengan menggunakan metode VAR data *time series*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan model *Hodrick Prescott Filter* untuk mengidentifikasi pertumbuhan kredit yang berlebihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial baik LTV, Giro Wajib Minimum, dan CCB memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Hasil uji *Hodrick Prescott Filter* menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan Indonesia telah melewati batas maksimal 1 STDEV (batas Bank Indonesia) dari trend jangka panjangnya yang menunjukkan adanya kelebihan kredit pada beberapa periode.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

³⁴ Aan Anisah, “Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial Dalam Mengurangi Risiko Kredit di Indonesia” (Skripsi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018).

dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat perbedaan pula pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang efektivitas instrumen kebijakan makroprudensial dalam mengurangi risiko kredit, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.

9. Dinar Putri Rahmawati, “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017”. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.³⁵

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, Kesehatan Bank mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Bank (Tobin’s Q). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 12 sampel perusahaan yang telah *go public*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan

³⁵ Dinar Putri Rahmawati, “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2018).

Kesehatan Bank secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank (Tobin's Q) dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 atau 0%, sedangkan hasil uji t Kebijakan Makroprudensial, dan Suku Bunga Dasar Kredit tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Bank dengan nilai signifikansi sebesar 0,509 dan 0,295 atau 50,9% dan 29,5%, sehingga hanya Kesehatan Bank yang berpengaruh namun tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau 4%.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu terdapat perbedaan pula pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap kinerja bank di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.

10. Zaenal Arifin, "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial LTV pada Risk Taking Behaviour Perbankan Indonesia (Implementasi LTV pada NPL Properti BUK Tahun 2011-2017)". Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Diponegoro.³⁶

Pada penelitian ini akan dilihat pengaruh dari adanya LTV dalam mengontrol NPL properti bank umum konvensional di Indonesia, dengan data bulanan dari tahun 2011-2017 pada saat kondisi perekonomian jangka panjang (keseimbangan) dan jangka pendek (ketidakseimbangan). Metode yang akan digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LTV mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai NPL di jangka panjang. Pada jangka pendek akan ada pengontrolan NPL dan pada akhirnya kembali ke kondisi jangka panjang. Selain itu variabel suku bunga, PDB, dan IHP juga mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan NPL di jangka panjang.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang pengaruh kebijakan makroprudensial LTV pada *risk taking behaviour* perbankan Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, ringkasannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

³⁶ Zaenal Arifin, "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial LTV Pada Risk Taking Behaviour Perbankan Indonesia (Implementasi LTV Pada NPL Properti BUK Tahun 2011-2017)". (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cut Leni Narisyah	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap Program UMKM untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM.	Pada penelitian terdahulu, objek penelitian yang digunakan yaitu pengaruh program CSR, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
2	Fahrudin	Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung terhadap Perkembangan UMKM menurut Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM.	Pada penelitian terdahulu, objek penelitian yang digunakan yaitu analisis peran program UMKM binaan Bank Indonesia provinsi Lampung, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan yaitu efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

3	Sri Maryati	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM.	Pada penelitian terdahulu, subjek penelitiannya yaitu BPRS. Sedangkan pada penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu UMKM di Kabupaten Jember.
4	Dwi Indri Novianti	Analisis Indeks Harga Properti Resedensial (IHPR), Suku Bunga Kredit, dan Instrumen Makroprudensial <i>Loan To Value</i> terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Periode 2012-2019	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Pada penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu LTV, sedangkan pada penelitian ini instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan yaitu rasio kredit UMKM.

5	Mahrus Lutfi Adi Kurniawan	Risiko Kredit Dan Kebijakan Makroprudensial Perbankan di Indonesia: Pendekatan Makro Stress-Testing (Periode 2009:Q1-2017:Q4)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang makro <i>stress testing</i> dengan pendekatan skenario <i>stress testing</i> , sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
6	Aliya Khairunnisa	Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu terdapat persamaan pula pada dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM.	Pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan yaitu revitalisasi UMKM melalui PSBI KPwBI Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

7	Novrianti Putri Ardely	Efektifitas Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Pada penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu LTV, sedangkan pada penelitian ini instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan yaitu rasio kredit UMKM.
---	------------------------------	---	---	---

8	Aan Anisah	Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial dalam mengurangi Risiko Kredit di Indonesia	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Pada penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu fokus penelitian pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang efektivitas instrumen kebijakan makroprudensial dalam mengurangi risiko kredit, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.
---	------------	---	--	---

9	Dinar Putri Rahmawati	Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Pada penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Selain itu fokus penelitian pada penelitian terdahulu mengkaji lebih jauh tentang pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap kinerja bank di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.
---	-----------------------	---	--	---

10	Zaenal Arifin	Pengaruh Kebijakan Makroprudensial LTV pada Risk Taking Behaviour Perbankan Indonesia (Implementasi LTV Pada NPL Properti BUK Tahun 2011-2017)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang kebijakan makroprudensial.	Pada penelitian terdahulu, fokus penelitian mengkaji lebih jauh tentang pengaruh kebijakan makroprudensial LTV pada <i>risk taking behaviour</i> perbankan Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.
----	---------------	--	--	---

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai perspektif ketika melakukan penelitian. Pembahasan teori yang lebih mendalam dan lebih luas akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁷

1. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna.³⁸ Menurut William

³⁷ Penyusun, *Pedoman*, 46.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,

dalam bukunya menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hal yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk, layanan atau moneternya.³⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Ravianto dalam Masruri, mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitasnya.⁴⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subagyo, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2002), 284.

³⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Edisi Kedua (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 429.

⁴⁰ Masruri dan Imam Muazansyah, "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2017), 366.

⁴¹ Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000), 53.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.⁴²

Sosialisasi program menurut Wilcox dalam Mardikonto yaitu memberikan informasi yang merupakan langkah awal untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu

⁴² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011),8.

pekerjaan, karena dengan memberikan informasi maka dapat meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.⁴³

Menurut Duncan dalam Steers menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan adanya tahapan baik dalam arti tahapan dalam pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.⁴⁴

Menurut Winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas menurut Subagyo, karena peneliti ingin mengetahui ukuran efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember melalui ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

⁴³ Mardikanto, Toto, dan Soebianto Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 86.

⁴⁴ Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985) 7.

⁴⁵ Winardi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 7.

2. Teori Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan. Implementasi juga dapat dipahami sebagai kegiatan untuk melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diuangkan untuk tujuan tersebut.⁴⁶

Menurut Grindle dalam Akib, implementasi diartikan sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Implementasi baru akan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan didistribusikan untuk mencapai tujuan.⁴⁷

Uraian sederhana tentang konsep implementasi juga dikemukakan oleh Lane dalam Akib, menjelaskan bahwa implementasi sebagai sebuah konsep dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama dari kedua fungsi ini adalah pada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai, serta dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.⁴⁸

Model Grindle mengemukakan bahwa implementasi kebijakan

⁴⁶ Puji Meilita Sugiana, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan", (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 16.

⁴⁷ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, (2010), 2.

⁴⁸ *Ibid.*, 2.

ditentukan oleh dua variabel utama yaitu *content of policy and content of implementation* (isi kebijakan, konteks implementasinya, dan dampak). Ide dasarnya adalah bahwa semua kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan harus dilakukan dan dampaknya harus diperhatikan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:⁴⁹

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan dan kedudukan pembuat kebijakan
- d. Pelaksanaan program
- e. Sumberdaya yang dikerahkan

Dalam penelitian ini model implementasi kebijakan yang digunakan adalah "*integrated implementation model*" yang dikembangkan oleh Soren C. Winter. Soren mengemukakan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:⁵⁰

- a. **Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi (*Organizational and Inter-organizational Behavior*).**

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

Pada tataran implementasi, komitmen yang dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dengan melibatkan

⁴⁹ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 61.

⁵⁰ Oni Lestari dan Hendra Wijayanto, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani", *Jurnal of Political Issues*, Vol. 3 No. 2, (2022), 101.

pelaksana program. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perasaan egois di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir pelaksanaan. Kontribusi suatu organisasi terhadap kinerja sangat tergantung pada input yang diterima dari hubungan antar organisasi yang bersifat timbal balik dan saling bergantung. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan dilakukan pada titik yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan. Pada tataran koordinasi, model hubungan antar organisasi sangat penting dan mempengaruhi penentuan strategi implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat dilakukan oleh dua atau lebih organisasi. Namun, karena implementasi kebijakan itu kompleks dan tantangan terhadap tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk kerjasama akan lebih rumit. Itulah sebabnya, terkadang karena adanya kompleksitas ini maka membuat permasalahan kebijakan terbengkalai.

Pemerintah belum mampu menerapkan kebijakan sampai ke akar permasalahan secara bersamaan.

b. Perilaku Organisasi Level Bawah (*Street Level Bureaucracy Behavior*)

Dimensinya adalah diskresi. Variabel selanjutnya yang menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Ini merupakan kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program sebagai keputusan penting dengan menggunakan

pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

c. Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Grup Behavior*)

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) tidak hanya mempengaruhi pada efektivitas/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi terhadap kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif dari masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan.

Variabel perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau penerima layanan yang berperan tidak hanya dalam dampak kebijakan tetapi juga dalam kinerja program melalui tindakan positif dan negatif. Dengan demikian, efektivitas implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipan yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

3. Teori Kebijakan Makroprudensial

a. Dimensi Konseptual Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

Global Financial Crisis (GFC) pada tahun 2007-2009 memberikan pelajaran penting dan pengalaman berharga yakni pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan juga meningkatkan kebutuhan dimensi makroprudensial dalam melakukan pengawasan keuangan dan regulasi. Krisis yang terjadi memberikan pengalaman

berharga bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang penting untuk menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai gejala sehingga mengganggu perekonomian. SSK memerlukan kemampuan dalam mengantisipasi terjadinya risiko sistemik yang disebabkan karena keterkaitan sistem keuangan dengan makroekonomi 'makro-finansial' serta langkah-langkah pencegahan agar dapat terhindar dari krisis di masa depan.⁵¹

Deutsche Bundesbank mengatakan bahwa stabilitas keuangan adalah kondisi dimana sistem keuangan memiliki kinerja yang efisien dalam fungsi ekonominya yaitu alokasi sumber dana, menyebar risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran yang dapat dilakukan walaupun terjadi gejala, tekanan dan perubahan struktural.⁵² Sedangkan Norges Bank mengatakan bahwa stabilitas keuangan adalah kondisi dimana sistem keuangan tahan terhadap guncangan dan mampu menyalurkan dana, melaksanakan pembayaran, dan mendistribusikan risiko secara efisien.⁵³ Kemudian Bank Sentral Eropa juga menambahkan definisi dari stabilitas keuangan yaitu didefinisikan sebagai suatu kondisi sistem keuangan yang mampu menahan guncangan dan ketidakseimbangan keuangan. Ini dapat meringankan gangguan dalam proses intermediasi keuangan yang cukup parah untuk mempengaruhi

⁵¹ Perry Warjiyo, dan Solikin M. Juhro, *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 595.

⁵² Deutsche Bundesbank, "Monthly Report-December 2003: Report on the Stability of the German Financial System", 8.

⁵³ Norges Bank, "Financial Stability Report 2020: Vulnerabilities and Risks", 2.

secara signifikan alokasi tabungan agar dapat meningkatkan peluang investasi.⁵⁴

Stabilitas sistem keuangan berbeda dengan stabilitas moneter. Stabilitas moneter merupakan suatu kondisi dimana uang memiliki nilai yang stabil dan digambarkan oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Stabilitas moneter ditempuh dengan kerangka kebijakan *inflation targeting framework* (ITF), sedangkan stabilitas sistem keuangan ditempuh dengan menggunakan kerangka kebijakan makroprudensial yang mencakup seluruh dimensi perekonomian, baik sektor keuangan dan sektor riil. Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan memiliki hubungan sebab akibat dalam jangka pendek, sehingga pada periode waktu tersebut sering terjadi ketidakstabilan antara keduanya. Krisis finansial terjadi akibat beberapa faktor utama yaitu terjadinya kerentanan sektor keuangan, penerapan kebijakan makroekonomi yang kurang pruden atau hati-hati, buruknya korporasi dan tata kelola kelembagaan pemerintah, dan terjadinya volatilitas aliran modal yang besar. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan deteksi dini kerawanan terhadap SSK dan juga pada keempat faktor tersebut. Selain itu, sangat diperlukan koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah, bank sentral, otoritas pengawasan, serta asuransi deposito.

⁵⁴ European Central Bank, “*Financial Stability Review June 2012*”, 5.

1) Krisis Keuangan Global 2008/2009 dan SSK

Menurut pernyataan Minsky, ketidakstabilan keuangan merupakan dampak dari ekonomi kapitalis di mana adanya kenaikan aset dan akumulasi utang menyebabkan terjadinya potensi yang tidak terkendali.⁵⁵ Krisis keuangan global 2008/2009 kembali memberikan perhatian atas rentannya ekonomi kapitalis yang mendasarkan pada modal dan perdagangan uang untuk melakukan pembiayaan investasi melalui sistem keuangan. Pada dua dekade saat *Great Moderation* di AS sebelum terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008/2009, pada saat suku bunga yang rendah serta didukung oleh stabilitas harga (inflasi) terjadi kenaikan nilai aset (keuangan dan fisik) dan keuntungan investasi yang lebih tinggi dari suku bunga utang atau biaya modal sehingga memunculkan persepsi bahwa keuntungan investasi akan terus tinggi pada periode *boom* ekonomi. Persepsi tersebut mampu mendorong semakin tingginya perdagangan uang dan modal untuk membiayai investasi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan akumulasi utang dari kredit perbankan atau utang luar negeri semakin tidak dapat dikendalikan. Perdagangan uang dan modal semakin didominasi oleh para investor 'spekulatif' dan 'ponzi' dibandingkan investor yang berhati-hati dan melakukan lindung nilai (*hedging*) yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan kerugian,

⁵⁵ Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan*, 595.

macet, dan menimbulkan ketidakstabilan keuangan sehingga mendorong ekonomi jatuh ke dalam krisis.⁵⁶

SSK merupakan suatu kondisi pada saat sistem keuangan menunjukkan ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi dan berfungsi secara baik di dalam perekonomian. Definisi SSK dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU-PPKSK) April 2016 mendefinisikan “Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri”, dengan merujuk “Stabilitas Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional”.

Dalam menjaga SSK dan mencegah krisis, terdapat lima aspek penting yang perlu ditekankan:⁵⁷

- a) Menjaga kesehatan lembaga keuangan sangat penting akan tetapi tidak cukup untuk mencegah terjadinya krisis (*necessary but not sufficient*). Kuncinya adalah perlu adanya keterkaitan makro-finansial dari sistem keuangan dengan aktivitas perekonomian daripada kesehatan individual lembaga keuangan, hal ini karena

⁵⁶ Ibid., 596.

⁵⁷ Ibid., 597.

SSK berkaitan dengan bagaimana sistem keuangan berfungsi untuk dan mampu bertahan terhadap gejolak di dalam perekonomian.

- b) Sejarah perekonomian telah menunjukkan adanya empat jenis keterkaitan makro-finansial yang sering menyebabkan terjadinya krisis, yaitu: *asset* (finansial dan properti) *bubbles*, *boom* kredit, akumulasi utang yang terjadi secara berlebihan, dan pembalikan modal asing secara tiba-tiba. Ketidakseimbangan tersebut sering mengakibatkan terjadinya prosiklikalitas keuangan dengan akselerasi yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi pada masa ekspansi ekonomi, sedangkan pada masa resesi tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi dan bahkan lebih cenderung memperburuk siklus ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dan pencegahan lebih dini terhadap fenomena prosiklikalitas karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mempercepat '*boom-bust*' yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya krisis.

- c) Penerapan kebijakan untuk pengendalian gejolak perekonomian domestik dan kemampuan mengantisipasi gejolak luar negeri sangat penting untuk dilakukan agar mendukung terjaganya SSK. Ketidakseimbangan makroekonomi dapat disebabkan karena adanya ekspansi permintaan domestik yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas perekonomian sehingga

menyebabkan pemanasan ekonomi yang tercermin antara lain pada tingginya inflasi, dan/atau defisit fiskal, dan/atau defisit transaksi berjalan. Selain itu, risiko kegagalan terhadap SSK dapat berasal dari dampak adanya spillover effect yang dipicu karena perubahan kebijakan negara lain atau karena krisis yang terjadi secara tiba-tiba. Gejolak eksternal tersebut dapat menyebabkan pembalikan aliran modal asing secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar sehingga kemudian menimbulkan tekanan dan krisis nilai tukar, krisis utang luar negeri, krisis pembayaran, juga krisis finansial dan perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan pelajaran untuk terjaganya SSK memerlukan kebijakan makroekonomi (moneter dan fiskal), reformasi struktural di sektor riil, serta manajemen aliran modal asing.

- d) Krisis dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti terjadinya kegagalan suatu lembaga keuangan, gejolak perekonomian domestik ataupun internasional, meletusnya gelembung prosiklikalitas karena adanya ketidakseimbangan makro finansial, proses pewabahan (*contagion*) dapat menjadi krisis sistemik ke seluruh sistem keuangan dengan sangat cepat karena adanya interkoneksi dan jejaring yang sangat erat di dalam pasar dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Globalisasi dapat menyebabkan *contagion* yang meluas ke

banyak negara karena adanya interkoneksi dan jejaring di antara pasar, lembaga, dan infrastruktur keuangan internasional. Selain itu, kegagalan individual bank juga mampu menyebabkan terjadinya bank runs dan meluas ke sistem perbankan karena interkoneksi dan kurangnya likuiditas di pasar uang antarbank.

- e) Puncak dari krisis secara luas terjadi apabila pewabahan melalui interkoneksi dan jejaring keuangan disertai dengan adanya perilaku lath (*herding behavior*) dan pewabahan informasi (*information contagion*). Perilaku lath dan pewabahan informasi menyebabkan krisis sub-prime mortgage di AS yang dengan cepat menjadi krisis finansial yang meluas dan sangat kompleks ke seluruh dunia melalui dampak jual obral aset di pasar keuangan dan keketatan kredit di sistem perbankan.

2) Peran Bank Sentral Dalam SSK

Bank sentral memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk dapat memitigasi risiko ketidakseimbangan makro finansial dan risiko sistemik dari sistem keuangan, sistem pembayaran dan sebagai *lender of the last resort* selain tugas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Kebijakan makroprudensial diarahkan agar mampu mengelola prosiklisitas keuangan terutama terhadap *credit boom* dan *asset bubbles* agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan makro-finansial penyebab krisis keuangan. Selain itu, kebijakan

makroprudensial juga diarahkan untuk dapat mengelola interkoneksi dan jejaring keuangan agar tidak menimbulkan risiko sistemik terutama melalui pasar uang antarbank dan infrastruktur keuangan.⁵⁸ Bank sentral merupakan lembaga yang sangat tepat untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Bank sentral memiliki kapasitas dalam melakukan *surveillance* makroekonomi dan makro-finansial, dan juga instrumen untuk melakukan kebijakan makroprudensial. Bank sentral merupakan lembaga yang menjadi sumber likuiditas di dalam sistem perekonomian maupun keuangan, baik melalui kebijakan moneter maupun fungsi *lender of the last resort*, dan ketersediaan likuiditas sangat untuk menjaga SSK.

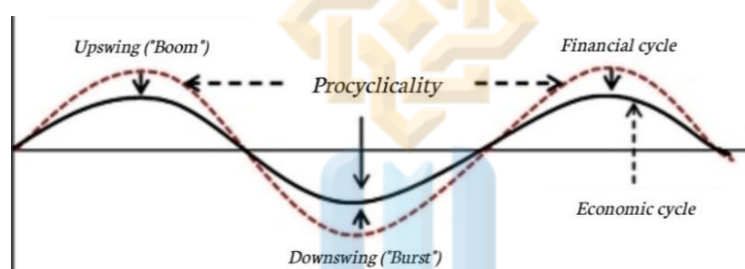
b. Model Teoretis Prosiklisitas Keuangan

Fenomena prosiklisitas merupakan fenomena di mana siklus keuangan mengakselerasi siklus ekonomi. Pada periode kondisi ekonomi meningkat, siklus keuangan akan cenderung lebih cepat daripada siklus ekonomi. Pada saat kondisi ekspansi kredit perbankan meningkat pesat, akumulasi utang terjadi berlebihan, harga aset keuangan dan properti sangat tinggi, dan aliran masuk modal dari luar negeri sangat tinggi. Semuanya melebihi kebutuhan kondisi fundamental ekonomi sehingga hal ini akan menimbulkan akumulasi risiko yang semakin tinggi dan kerentanan di dalam sistem keuangan. Sementara itu sebaliknya terjadi, dalam kondisi periode ekonomi menurun, siklus keuangan justru akan

⁵⁸ Ibid., 602.

lebih memperburuk penurunan siklus ekonomi. Krisis keuangan dan ekonomi terjadi akibat *shock* yang terjadi baik dari domestik maupun luar negeri di tengah kondisi kerentanan sistem keuangan karena akumulasi risiko yang terlalu tinggi.⁵⁹

Gambar 2.1
Prosiklisitas Siklus Keuangan dan Siklus Ekonomi



Sumber: Warjiyo dan Solikin,⁶⁰ diolah

Fenomena prosiklisitas terjadi karena konsekuensi dari interaksi dinamis antara sektor keuangan dengan sektor ekonomi riil disebut ‘*macro-financial linkages*’ yang disebabkan oleh faktor-faktor dari sisi mikro sektor keuangan maupun sisi makroekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prosiklisitas dalam penyaluran kredit dan pembiayaan modal lain di dalam perekonomian dari sisi mikro sektor

keuangan, antara lain sebagai berikut:⁶¹

- 1) Adanya asimetri informasi antara kreditur dan debitur yang mengakibatkan fenomena premi risiko suku bunga (*external finance premium*) atau penjatahan kredit (*credit rationing*).

⁵⁹ Ibid., 606.

⁶⁰ Ibid., 606.

⁶¹ Ibid., 607.

- 2) Regulasi dan metode akuntansi dapat mendorong terjadinya prosiklisitas.
- 3) Adanya perubahan persepsi pelaku ekonomi dapat meningkatkan volatilitas harga aset dalam siklus keuangan dan ekonomi.
- 4) Dari sisi makroekonomi, intensitas prosiklisitas sistem keuangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Ekspansi fiskal umumnya terjadi lebih cepat pada kondisi periode ekonomi sedang meningkat karena lebih besarnya pajak, lebih mudahnya utang pemerintah, dan faktor lain. Aliran modal asing dalam berbagai bentuknya, termasuk utang luar negeri, umumnya relatif besar pada saat periode ekonomi meningkat dan rentan terhadap pembalikan ke luar negeri pada saat periode ekonomi menurun. Kebijakan moneter juga memiliki pengaruh terhadap prosiklisitas sistem keuangan melalui perubahan nilai tukar, suku bunga, kredit, ataupun perilaku risiko di sektor keuangan.

c. Kebijakan Makroprudensial: Dari Teori hingga Instrumen Kebijakan

Menurut International Monetary Fund (IMF), kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang mempunyai tujuan utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan membatasi peningkatan risiko sistemik.⁶² Sedangkan BIS mengatakan bahwa kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya

⁶² Departemen Kebijakan Makroprudensial, *Mengupas Kebijakan Makroprudensial* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 3.

krisis sistemik.⁶³ Sementara itu, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial memberikan arahan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien.⁶⁴ Schoenmaker mengatakan bahwa pengawasan keuangan harus memiliki fokus pada agregat (makroprudensial) tidak hanya pada individu (mikroprudensial) untuk memperbaiki ketidakseimbangan, dan pengawasan makroprudensial bekerja pada tingkat sistem keuangan dan berkaitan dengan dampak ekonomi yang lebih luas serta makroprudensial harus mampu meningkatkan ketahanan sistem keuangan dari guncangan ekonomi.⁶⁵

Kebijakan makroprudensial memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Dimensi waktu (*time-series*), merupakan kebijakan makroprudensial memiliki tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya *prosiklikalitas* yang berlebihan dalam sistem keuangan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip mendorong lembaga keuangan untuk mempersiapkan bantalan (*buffer*) yang cukup pada saat perekonomian dalam keadaan baik sehingga bantalan tersebut dapat digunakan ketika perekonomian sedang buruk.

⁶³ Ibid., 2.

⁶⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, pasal 1 ayat (2).

⁶⁵ Dirk Schoenmaker dan Peter Wierts, "Macroprudential Supervision: From Theory to Policy", European Systemic Risk Board (ESRB): Working Paper Series, No. 2 (2016), 2.

⁶⁶ Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan*, 604.

2) Dimensi antarsektor (*cross-sector*), merupakan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk menggeser fokus dari regulasi prudensial yang diterapkan pada institusi keuangan berubah menjadi regulasi sistem secara keseluruhan. Pergeseran fokus ini dilakukan karena krisis-krisis besar yang terjadi adalah akibat dari eksposur terhadap ketidakseimbangan makro- keuangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sebagian besar pelaku keuangan bukanlah akibat masalah individu bank.

Kebijakan makroprudensial memiliki banyak instrumen, menurut basisnya instrumen kebijakan makroprudensial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Instrumen kebijakan makroprudensial berbasis kredit bank:
 - a) Rasio intermediasi makroprudensial;
 - b) LTV dan uang muka;
 - c) Rasio UMKM.
- 2) Instrumen kebijakan makroprudensial berbasis permodalan bank:
 - a) *Countercyclical Capital Buffer* (CCB);
 - b) Penentu bank sistemik.
- 3) Instrumen kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas bank:
 - a) Penyangga likuiditas makroprudensial;
 - b) Posisi devisa neto.

d. Mekanisme dan Evaluasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan UMKM

Bank Indonesia berperan dalam pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial terutama dalam mendorong fungsi intermediasi dan peningkatan akses keuangan. Salah satu perihal utama yang menjadi perhatian Bank Indonesia terkait UMKM adalah akses keuangan.⁶⁷

UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang kuat sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi banyak kendala, termasuk akses keuangan.⁶⁸

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang dijadikan alat utama oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral terus mendorong penguatan akses keuangan UMKM baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, Bank Indonesia telah menetapkan salah satu kebijakan makroprudensial tentang rasio kredit UMKM sebagaimana dijelaskan dalam PBI No. 17/12/PBI/2015, yaitu bank umum wajib

⁶⁷ Bank Indonesia, "Pengembangan UMKM", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx> (5 Oktober 2021).

⁶⁸ Bank Indonesia, "Pengembangan UMKM", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx> (5 Oktober 2021).

mengalokasikan sebesar minimum 20% dari total kredit untuk UMKM baik dalam bentuk kredit langsung, maupun kredit tidak langsung melalui *executing*, *channeling*, dan sindikasi. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis, termasuk dukungan pertemuan bisnis antara bank dengan UMKM untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Selain itu, melalui Kantor Perwakilan di daerah, Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan model bisnis guna mendorong akses pembiayaan UMKM.⁶⁹

Secara khusus, pengaturan teknis dari ketentuan tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM diatur melalui SE No. 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015. Cara penghitungan rasio pemberian kredit/pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember setiap tahunnya, adalah:⁷⁰

$$\frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio kredit memperhitungkan pemberian kredit UMKM secara langsung maupun tidak langsung melalui pola *executing*, *channeling*, dan sindikasi. Khusus bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) dan Bank Campuran, dapat memperhitungkan kredit untuk ekspor non migas dalam rasio kredit UMKM. Pola *executing* merupakan penyaluran kredit atau

⁶⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*, 118.

⁷⁰ Juda Agung, Cicilia A. Harun, dan Elis Deriantino, *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 257.

pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yaitu: BPR, BPRS, dan/atau lembaga keuangan non bank lainnya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Maal Wa Tamwil* dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pola *channeling* merupakan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan tertentu, yaitu: BPR, BPRS, dan/atau lembaga keuangan non bank lainnya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Maal Wa Tamwil* dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pembiayaan bersama (sindikasi) merupakan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan bersama oleh bank umum dan lembaga keuangan tertentu, yaitu: BPR, BPRS, dan/atau lembaga keuangan non bank lainnya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Maal Wa Tamwil* dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.⁷¹

Pemantauan terhadap pemenuhan rasio kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum dilakukan secara tahunan terhadap pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM bank umum posisi akhir tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi teguran tertulis dan penerapan kewajiban penyediaan alokasi dana untuk penyelenggaraan pelatihan kepada UMKM (sebagai contoh: data realisasi penyaluran kredit UMKM Bank posisi Desember 2019 akan menjadi objek pemantauan pemenuhan ketentuan rasio kredit UMKM pada awal tahun 2020). Khusus

⁷¹ Ibid., 258.

kewajiban penyediaan alokasi dana pelatihan bagi BUS diwajibkan untuk direalisasikan pada tahun berikutnya dan dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya.⁷²

Sejak diberlakukannya PBI terkait kewajiban pemenuhan rasio kredit atau pembiayaan UMKM tahun 2015, pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM secara industri meningkat menjadi di atas 20%, namun peningkatannya cukup terbatas dengan rasio tertinggi sebesar 20,87% pada tahun 2017. Berdasarkan jumlah bank, semakin besar target rasio kredit UMKM yang harus dicapai setiap tahunnya, jumlah bank yang tidak memenuhi ketentuan juga semakin tinggi dengan porsi 57% atau 62 Bank pada September 2020. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penyaluran kredit UMKM di Indonesia didominasi oleh sebagian kecil bank mengingat secara rasio kredit mencapai 20% namun masih banyak bank yang belum mencapainya.⁷³

Tabel 2.2
Perkembangan Pencapaian Rasio Kredit UMKM dan Jumlah Bank

Tahun	A	B	C	D
2014	19,80%	65	34	20
2015	20,10%	45	17	53
2016	20,19%	34	28	56
2017	20,87%	50	18	47
2018	20,49%	30	20	65
2019	20,46%	32	19	59

⁷² Ibid., 258.

⁷³ Ibid., 260.

Bulan	A	B	C	D
Jan-20	20,60%	28	23	59
Feb-20	20,81%	25	24	61
Mar-20	20,47%	24	23	63
Apr-20	20,51%	24	24	62
Mei-20	20,38%	20	28	62
Jun-20	20,35%	21	28	61
Jul-20	20,37%	23	26	61
Agu-20	20,42%	22	26	62
Sep-20	20,52%	23	24	62

Keterangan:

A) % Rasio kredit UMKM

B) Jumlah bank yang mencapai target rasio; NPL < 5%

C) Jumlah bank yang mencapai target rasio; NPL > 5%

D) Jumlah bank yang tidak mencapai target rasio

Sumber: Juda Agung, Cicilia A. Harun, dan Elis Derianto⁷⁴

Berdasarkan hasil FGD⁷⁵ dan identifikasi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum meningkatnya rasio kredit UMKM meskipun telah diatur kewajibannya dalam ketentuan, yaitu antara lain:

- 1) *Enforcement* sanksi/disinsentif yang kurang kuat.
- 2) Cakupan ketentuan yang belum disesuaikan dengan perkembangan jenis penyaluran kredit UMKM terkini.

Faktor penyebab per kelompok bank disampaikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penyebab Belum Tercapainya Rasio Kredit UMKM

Kelompok Bank	Penyebab Belum Tercapai
Persero	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit non UMKM lebih tinggi. • Bank fokus pada pembiayaan sektor tertentu (misal: perumahan).

⁷⁴ Ibid., 260.

⁷⁵ FGD Bank Indonesia dengan Perbankan terkait penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM, 2019.

BUSN	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jaringan kantor dan infrastruktur bank sehingga tidak mendukung kredit UMKM yang tepat sasaran dan mampu mempertahankan kesehatan bank. • Kredit bermasalah di sektor UMKM. • Kesalahan pelaporan bank karena kelemahan pada <i>core banking system</i> atau perbedaan definisi UMKM.
BPD	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus bisnis bank pada pembiayaan konsumtif pegawai/PNS yang berisiko rendah sehingga infrastruktur dan SDM tidak mendukung penyaluran kredit UMKM. • NPL tinggi. • <i>Pricing</i> kurang kompetitif dibandingkan KUR.
Bank Asing dan Campuran	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Core</i> bisnis bank kepada pembiayaan korporasi sehingga infrastruktur dan SDM tidak mendukung penyaluran kredit UMKM. • Keterbatasan jaringan kantor. • Ekspor non migas menurun.

Sumber: FGD Bank Indonesia dengan Perbankan terkait penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM, 2019.

Kedepannya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap cakupan dan mekanisme dari ketentuan kewajiban realisasi kredit UMKM di atas, agar dapat semakin efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Beberapa masukan terhadap penyempurnaan ketentuan, antara lain:⁷⁶

- 1) Perluasan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM:
 - a) Penambahan pola kerjasama *channeling* untuk KCBA dan bank campuran.
 - b) Perluasan lembaga penyalur, yaitu: Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

⁷⁶ Agung, *Kebijakan*, 261.

(LPEI), *Financial Technology (Fintech)*, dan lembaga lainnya yang menyalurkan kredit kepada UMKM (produktif).

c) Pembiayaan melalui pola *supply chain*, seperti penyedia dana dan distributor pembiayaan, serta anjak piutang (*factoring*) untuk UMKM.

d) Perluasan cakupan pada *subsistence* dan sekuritisasi berbasis kredit UMKM.

2) Penguatan sanksi atau kewajiban bagi bank umum yang tidak memenuhi ketentuan, dan sebaliknya bagi bank umum yang mencapai diberikan insentif yang dapat memotivasi dalam penyaluran kredit UMKM.

4. Teori UMKM

Adanya definisi yang jelas tentang UMKM sangat diperlukan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan pengembangan sektor usaha tersebut. Selain itu, diperlukan definisi untuk mengidentifikasi kebutuhan

UMKM dan efektivitas program pengembangan kepada unit usaha yang dimaksud. Namun, salah satu kesulitannya adalah bahwa tidak ada pemahaman yang berlaku secara universal tentang kriteria dari UMKM.

Meski ada perbedaan di berbagai negara, namun secara umum ada beberapa indikator dan kriteria yang lazim digunakan dalam definisi tersebut.⁷⁷

Misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikannya

⁷⁷ Abdul Azis dan Herani Ruslan, *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2009), 3.

menjadi empat kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja. Pertama, industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja berjumlah antara 1 sampai 4 orang. Kedua, industri kecil dengan tenaga kerja berjumlah antara 5 sampai 9 orang. Ketiga, industri sedang menengah apabila memiliki tenaga kerja berjumlah diantara 10 sampai 99 orang. Terakhir, industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.⁷⁸

Merujuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

⁷⁸ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 2.

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷⁹

Merujuk undang-undang ini, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00.
- 2) Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00.
- 3) Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Namun ada perubahan aturan terkait dengan kriteria UMKM yang sebelumnya telah diatur di dalam UU UMKM, perubahan tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 ayat (1-3).

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 6 ayat (1-3).

Kecil dan Menengah (PP UMKM) yang telah diterbitkan oleh pemerintah dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM dalam UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Merujuk pada peraturan pemerintah ini, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Kriteria usaha mikro adalah memiliki modal usaha paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00.
- 2) Kriteria usaha kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai paling banyak Rp15.000.000.000,00.
- 3) Kriteria usaha menengah adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 35 ayat (3-5).

Dengan memperhatikan pengertian dan kriteria UMKM tersebut diatas, maka Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia juga memiliki karakteristik UMKM tersendiri yang merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada pelaksanaan usaha dan perilaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik tersebut merupakan karakteristik yang membedakan antara pelaku usaha dengan usahanya.⁸² Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi menjadi tiga kategori: 1) Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang; 2) Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang; dan 3) Usaha menengah dengan jumlah karyawan 300 orang.⁸³

Dari perspektif usaha, LPPI dan Bank Indonesia membagi UMKM menjadi empat kelompok:⁸⁴

- 1) UMKM sektor informal seperti pedagang kaki lima;
- 2) UMKM Mikro adalah UMKM yang memiliki keterampilan manual tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya;
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang dapat berwirausaha dengan cara bermitra (menerima subkontrak) dan mengekspor;
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki kewirausahaan siap menjadi usaha besar.

⁸² LPPI dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (2015), 12.

⁸³ Ibid., 12.

⁸⁴ Ibid., 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah yang menggunakan data untuk tujuan tertentu. Menurut Andi Prastowo, metode penelitian adalah suatu proses kerja yang sistematis, teratur dan tertib, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna memperoleh kebenaran yang objektif.⁸⁵

Berdasarkan pengertian diatas, metode penelitian dapat dipahami sebagai cara utama yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan teknik dan alat-alat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan dan ditetapkan secara ilmiah. Adapun metode pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang kompleks dari objek yang diteliti dan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi secara mendalam dengan menjelaskan secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Yang mana penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan, dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif harus bersifat "*Perspektif Emic*". Peneliti harus mendapatkan data "sebagaimana harusnya", bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh

⁸⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011), 25.

peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan.⁸⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).⁸⁷ Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian didasari besarnya potensi wilayah yang ditandai dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur. Merujuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Timur,⁸⁸ Kabupaten Jember memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Dari total 9.782.262 unit UMKM, sebanyak 647.416 unit usaha atau sekitar 6,62% berada di Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang biasa dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dengan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang diharapkan peneliti

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295.

⁸⁷ Penyusun, *Pedoman*, 46.

⁸⁸ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, “Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2018”, <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm> (22 Juni 2021).

atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁸⁹ Sedangkan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.⁹⁰

Untuk menghasilkan validitas dan reliabilitas data, maka dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data/informan yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Pemberi atau pelaksana kebijakan;
- 2) *Stakeholder* pelaksana kebijakan;
- 3) Penerima kebijakan.

Adapun yang dimaksud dengan pemberi atau pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Dalam memilih informan, pertimbangan yang dimuat yaitu informan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a) Bersedia diwawancarai; b) Pegawai Bank Indonesia Jember; c) Pelaksana kebijakan makroprudensial; d) Berada di Kabupaten Jember. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih informan untuk dijadikan sumber informasi dalam penelitian, yaitu Bapak Hafidz

⁸⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 53.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 219.

Yudhansyah, selaku *Person in Charge* (PIC) Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember.

Sedangkan yang dimaksud dengan *stakeholder* pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah Komunitas YukBisnis Jember sebagai *stakeholder* utama dan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember sebagai *stakeholder* pendukung. Dalam memilih informan, pertimbangan yang dimuat yaitu informan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a) Bersedia diwawancarai; b) Anggota Komunitas YukBisnis Jember/GenBI Jember; c) *Stakeholder* pelaksana kebijakan makroprudensial; d) Berada di Kabupaten Jember. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih 2 informan untuk dijadikan sumber informasi dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bapak Eko Nuryahya, selaku *Entrepreneur Practitioner* dan Koordinator Yukbisnis Jember;
- 2) Olivia Salsabilla, selaku *Implementing Partner* GenBI Jember.

Sementara itu, yang dimaksud dengan penerima kebijakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang pernah atau sedang mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Dalam kaitannya, UMKM yang menjadi sasaran kebijakan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia yaitu: UMKM yang mendukung pengendalian inflasi komponen bergejolak (*volatile food*), UMKM yang menghasilkan komoditas ekspor guna penerimaan devisa, dan UMKM unggulan yang mengembangkan potensi lokal.⁹¹ Sedangkan jumlah

⁹¹ Bank Indonesia, “*Laporan Perekonomian Indonesia 2017: Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur*”, 134.

UMKM yang pernah atau sedang mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia Jember sebanyak 30 UMKM.⁹²

Dalam memilih informan pertimbangan yang dimuat yaitu informan yang memiliki UMKM dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a) Termasuk ke dalam UMKM pengendali inflasi dan/atau UMKM potensi ekspor dan/atau UMKM unggulan potensi lokal; b) Sudah berjalan minimal selama 3 tahun; c) Pernah atau sedang mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia Jember; d) Pernah atau sedang mendapatkan bantuan teknis dari Bank Indonesia Jember; e) Berada di Kabupaten Jember. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih 3 informan untuk dijadikan sumber informasi dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ibu Farida selaku Pemilik Usaha UMKM Afa Choco and Snack;
- 2) Bapak Yusron selaku Manajer UMKM KSU Buah Ketakasi;
- 3) Bapak Sutrimo selaku Ketua Kelompok Tani UMKM Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat sebagai alat bantu dalam penyusunan penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari ketiga teknik ini memiliki peran yang berbeda dalam menggali informasi yang tepat serta akurat dan dibutuhkan

⁹² Observasi di Bank Indonesia Jember, 10 September 2021.

oleh peneliti. Adapun pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut Nasution, dalam buku yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.⁹³

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Data yang didapat melalui observasi terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan intraksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati dalam kegiatan tersebut.⁹⁴

Melalui tahap observasi ini peneliti mengumpulkan secara lengkap. Teknik pengamatan ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang implementasi dan efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember. Data yang diperoleh dari pengamatan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Metode pengamatan ini berupa

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 226.

⁹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 66.

pengamatan langsung dan didukung dengan wawancara untuk mendapatkan data tentang implementasi dan efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan informanpun tidak ada keinginan untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe wawancara bebas terpimpin, wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹⁵ Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a) Mengenai implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.
- b) Mengenai efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

⁹⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2010), 74.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sejumlah dokumen terkait bentuk implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember serta gambar selama proses pengumpulan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, ketika di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlanjut sampai penulisan hasil penelitian.⁹⁷ Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengatur data ke dalam kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 333.

dapat diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁹⁸ Milles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan *verification*/penarikan kesimpulan. Analisis menurut Miles dan Huberman, dibagi dalam tiga tahapan:

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart*, dan sejenisnya. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

3) Penarikan simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2014), 202.

diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁹⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.¹⁰⁰

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.¹⁰¹ Validitas merupakan suatu alat pengukur, suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu mengukur apa yang sebenarnya diukur oleh alat itu. Artinya, validitas data adalah merupakan data yang telah terkumpul dan dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.¹⁰² Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

¹⁰⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 363.

¹⁰² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 167.

triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.¹⁰³

G. Tahap-tahap Penelitian

Sebagaimana suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Urutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian melalui beberapa tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan merupakan segala macam persiapan yang dibutuhkan sebelum penelitian dan terjun kedalam kegiatan lapangan, dalam tahapan ini peneliti melakukan rencana penelitian. Rencana ini berupa proposal penelitian, mengurus perijinan, dan instrumen penelitian.

Tahap berikutnya yaitu tahap lapangan, dimana tahap ini merupakan suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan.

Selanjutnya adalah tahapan penulisan laporan, pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan, setelah data dianalisis barulah masuk ke tahap selanjutnya yaitu penulisan laporan.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 369.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Bank Indonesia Jember

Kantor Bank Indonesia Jember terletak di Jl. Gajah Mada No.224, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bank Indonesia Jember memiliki beberapa tugas antara lain yaitu, mengendalikan inflasi di wilayah kerja Bank Indonesia Jember; menjaga kelancaran sistem pembayaran; menstabilisasi sistem keuangan; berkoordinasi dengan pemerintah, dinas-dinas, institusi-institusi dan perusahaan untuk menjaga hubungan baik agar saling berjalan bersama demi kemajuan ekonomi di wilayah kerja Bank Indonesia Jember.¹⁰⁴

Visi dan misi merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan baik bagi perusahaan ataupun organisasi tertentu. Setiap perusahaan atau organisasi pasti mempunyai visi dan misi dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan panduan yang telah ditentukan oleh pimpinan. Oleh karena itu, visi dan misi dari Bank Indonesia sendiri adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

a) Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik diantara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

¹⁰⁴ Hafidz, *wawancara*, Jember, 30 Desember 2021

¹⁰⁵ Bank Indonesia, "Profil Bank Indonesia", <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx> (11 Januari 2022)

b) Misi

- Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia;
- Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
- Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
- Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
- Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

2. Gambaran Umum *Stakeholder* Pelaksana Kebijakan

a) Yukbisnis

Yukbisnis merupakan komunitas penyedia platform untuk pengembangan bisnis. Didirikan pada tahun 2012 dengan produk utamanya yaitu platform toko online YubiPRO. Sejak saat itu Yukbisnis terus berkembang dan membangun ekosistem toko *online*, mulai dari platform pembangun trafik sampai layanan pemenuhan pesanan (*fulfillment*), hingga sampai saat ini ada beberapa produk tambahan yaitu Yubimini yang merupakan tokonya media sosial dan Yubistore yang merupakan *mall* pebisnis Indonesia.

Yukbisnis juga memiliki komunitas yang tersebar lebih dari 20 kota di Indonesia dan mancanegara, komunitas tersebut aktif mengadakan berbagai kegiatan *sharing*, *mentoring*, maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bisnis. Sementara itu untuk lokasinya terletak di Jl. Wangsa Ningrat No.16 Cipeundeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

1) Visi

Menciptakan perekonomian mandiri yang *rahmatan lil'alamiin*.

2) Misi

- Mengedukasi UMKM untuk melek online dan pentingnya brand, bukan sekedar menjual.
- Mengintegrasikan UMKM masuk dalam ekosistem Yukbisnis, agar terpantau secara database.

- Menumbuhkan UMKM dengan ekosistem Yukbisnis.

Tabel 4.1
Tim Pendamping UMKM Yukbisnis

No	Nama	Jabatan
1	Eko Nuryahya	<i>Entrepreneur Practitioner</i>
2	Agus Hadi Prayitno	<i>Professional Coach</i>
3	Askhabul Mukminin	<i>Professional Trainer</i>
4	Victor Wahanggara	<i>Digital Expert</i>
5	Wawan Kotaro	<i>Videographer</i>
6	Fathurrohman	<i>Social Media Practitioner</i>
7	Senna Munza	<i>Social Media Practitioner</i>

Sumber: Profil Komunitas Yukbisnis

b) Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember

GenBI Jember merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada dibawah naungan Bank Indonesia, dibentuk pada tanggal 21 April 2015 dan bersekretariat didalam wilayah Kantor Bank Indonesia Jember. Pada awalnya komunitas ini beranggotakan 40 orang mahasiswa dari Universitas Jember dan Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, namun dengan berjalannya waktu terdapat penambahan anggota hingga sampai saat ini jumlahnya sebanyak 125 orang.

Tujuan dari GenBI Jember yaitu menjadikan anggotanya sebagai: *frontliners* Bank Indonesia (mengkomunikasikan kelembagaan dan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum; *change agents* (menjadi agen perubahan dan *role model* dikalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat); *future leaders* (menjadi pemimpin masa depan pada berbagai bidang dan tingkatan).

1) Visi

Menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan serta dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara.

2) Misi

- Menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik (*Initiate*)
- Menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa (*Act*)
- Peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat (*Share*)
- Berbagi inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri (*Inspire*)

Tabel 4.2

Struktur Organisasi *Implementing Partner* GenBI Jember

No	Nama	Jabatan
1	Olivia Salsabilla	Koordinator <i>Implementing Partner</i>
2	M. Fikri Athaya Arkan	<i>Implementing Partner</i>
3	Erinna Nadya F.	<i>Implementing Partner</i>
4	Priskila Margaretha G.	<i>Implementing Partner</i>
5	Irsyad Abdu Mukohar	<i>Implementing Partner</i>

Sumber: Profil Komunitas GenBI Jember

3. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a) Afa Choco and Snack

Afa Choco and Snack didirikan pada tahun 2012 oleh Ibu Farida, ini merupakan sebuah perusahaan asal Kabupaten Jember yang

memilih cokelat sebagai produk utamanya, walaupun terkesan mudah dibuat cokelat tetap terlihat istimewa karena digemari banyak kalangan. Beralamat di Jl. Argopuro No. 43 Rambipuji, Afa Choco and Snack saat ini memiliki banyak varian olahan cokelat. Diantaranya, cokelat bar, keripik cokelat, cokelat praline yang dikemas dalam bentuk *gift box*, dan cokelat praline yang dicampur dengan bubuk kopi.

1) Visi

Menjadi perusahaan yang mandiri dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Misi

- Memproduksi produk berkualitas;
- Memberdayakan masyarakat;
- Menjalin mitra secara strategis.

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Afa Choco and Snack

No	Nama	Jabatan
1	Farida	<i>Owner/Pemilik Perusahaan</i>
2	Sundari	<i>Supervisor</i>
3	Angga	<i>Marketing</i>
4	Natus	Karyawan Pelaksana Produksi
5	Helin	Karyawan Pelaksana Produksi
6	Ana	Karyawan Pelaksana Produksi
7	Alfi	Karyawan Pelaksana Produksi

Sumber: Profil UMKM Afa Choco and Snack

b) Binamitra Usahatani Hortikultura Multiagro Makmur

Binamitra Usahatani Hortikultura Multiagro Makmur merupakan suatu lembaga yang membina para petani dalam agribisnis khususnya komoditi hortikultura di wilayah Kabupaten Jember. Didirikan pada tahun 2009, lembaga ini berlokasi di Dusun Cangkring Baru, RT 01 RW 15, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Tujuan dari lembaga ini yaitu untuk membentuk suatu kelompok tani yang solid dan mampu memproduksi produk pertanian khususnya komoditas hortikultura sesuai konsep *Good Agricultural Practices* (GAP) khususnya di Kabupaten Jember guna memenuhi kebutuhan pasar atas produk pertanian yang bermutu, sehat dan ramah lingkungan.

Model usaha yang dilakukan oleh Binamitra Usahatani Hortikultura Multiagro Makmur yaitu berupa pembinaan kepada para anggota, yakni petani pelaku usaha dibidang agribisnis khususnya komoditi hortikultura dengan azas kekeluargaan dan semangat gotong royong. Petani diberi wawasan tentang pentingnya berkelompok dengan ikatan batin yang solid, laksana satu badan, sehingga memiliki kekuatan untuk menghadapi pasar bebas. Anggota kelompok mendapatkan bimbingan untuk penguasaan teknik budidaya yang baik dan diarahkan untuk mengembangkan usaha. Produk hortikultura yang dihasilkan kelompok dijual melalui lembaga untuk memenuhi pasar, khususnya yang berbentuk kerja sama dengan perusahaan atau para pelaku bisnis lain.

Tabel 4.4
Struktur Organisasi Binamitra Usahatani Holtikultura
Multiagro Makmur

No	Nama	Jabatan
1	Sutrimo	Ketua Kelompok
2	Abdurrohman	Sekretaris
3	Amalia Eka Nurlita	Bendahara
4	Anwar	Bidang Litbang dan SDM
5	Hadi Sutrisno	Bidang Distribusi
6	Ida Mahrita	Bidang Pasca Panen
7	Sunari	Bidang Budidaya
8	Petani Holtikultura	Anggota Kelompok

Sumber: Profil UMKM Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur

c) KSU Buah Ketakasi

Jauh dari pusat pemerintahan tepatnya di wilayah paling timur Kabupaten Jember terdapat sebuah desa bernama Sidomulyo, merupakan sebuah daerah pegunungan yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta. Sejak tahun 1987, Desa Sidomulyo telah melakukan Program Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor (PRPTE) dengan komoditas utamanya adalah kopi robusta beserta pelindungnya.

Melihat perkembangan kopi robusta sidomulyo yang semakin pesat, pada tahun 2007 para kelompok tani menginisiasi terbentuknya Koperasi Serba Usaha (KSU) Buah Ketakasi. Di bawah naungan KSU Buah Ketakasi pengembangan kopi robusta Sidomulyo semakin maju dan berkembang, hingga saat ini telah mengeluarkan beberapa produk yaitu berupa *green bean*, *roast bean* dan kopi bubuk.

1) Visi

Membawa perubahan sosial dan budaya masyarakat hulu hilir yang berkelanjutan

2) Misi

- Menciptakan produk lokal yang mampu bersaing global
- Menjadi penyedia kopi khas Jember yang berkualitas dengan harga terjangkau
- Menjadi alat promosi potensi kawasan kebun kopi
- Menumbuhkan wirausaha baru khususnya yang berkaitan dengan kopi.

Tabel 4.5

Struktur Organisasi KSU Buah Ketakasi

No	Nama	Jabatan
1	Suwarno	Ketua
2	Achmad Jailani	Sekretaris 1
3	Slamet Riyadi	Sekretaris 2
4	Alifah	Bendahara
5	Yusron	Manajer
6	Rini	Kepala Unit
7	Mulyani	Kepala Unit Sarana Produksi
8	Panji	Kepala Unit Pemasaran
9	Hudori Fadil	Kepala Unit Produksi
10	Sunari	Kepala Unit Jasa
11	Moch. Bunaris	<i>Surveyor</i>
12	Salam	<i>Debt Collector</i>
13	Ningsih	Staf Sarana Produksi
14	Petani Kopi	Anggota

Sumber: Profil UMKM KSU Buah

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung proses penelitian. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara mendalam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat dipahami sebagai proses menerjemahkan peraturan menjadi tindakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang jarang bermuatan politik karena keterlibatan berbagai kepentingan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ialah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang di amanatkan oleh kebijakan tersebut.

Sedangkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (*output*), yaitu apakah tujuan yang ingin dicapai itu tercapai atau tidak. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan menanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, khususnya dengan meninjau pada *action* program dari masing-masing individu, dan yang kedua apakah tujuan program tersebut telah tercapai.

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Soren C. Winter, ada tiga variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:¹⁰⁶

a) Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi (*Organizational and Inter-organizational Behavior*)

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember adalah perilaku organisasi dan antar organisasi yang mencakup dua komponen, yaitu komitmen dan koordinasi.

1) Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi yaitu kesepakatan bersama dengan organisasi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada. Dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Jember pihak organisasi yang dimaksud yaitu Bank Indonesia Jember, GenBI Jember dan

Yukbisnis yang merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang pengembangan bisnis. Tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan yang dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing organisasi yang terlibat. Disinilah diperlukan adanya kesepakatan dan komitmen bersama agar tidak mengedepankan kepentingan

¹⁰⁶ Oni Lestari dan Hendra Wijayanto, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani", *Jurnal of Political Issues*, Vol. 3 No. 2, (2022), 101.

masing-masing dalam mencapai tujuan dari pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

Hasil wawancara peneliti dengan PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember mengenai bagaimana bentuk komitmen dari implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember mengatakan:

“Komitmen terhadap implementasi kebijakan makroprudensial ini sedang kami laksanakan ditunjukkan dengan semua pihak yang terlibat ikut berpartisipasi aktif terhadap kebijakan. Dengan adanya kebijakan ini sangat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui penambahan modal yang akan diberikan oleh perbankan. Bentuk komitmennya ya kita menjalankan apa yang sudah menjadi tugas dari Bank Indonesia yaitu memberikan berbagai peralatan produksi yang dibutuhkan UMKM, memfasilitasi *business matching* antara perbankan dan pelaku UMKM, serta memberikan kebijakan tentang alokasi kredit untuk UMKM minimal sebesar 20%. Dalam hal ini kita juga mempunyai komitmen tertulis dengan *stakeholder* yang kompeten untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan”.¹⁰⁷

2) Koordinasi Organisasi

Salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam jaringan antar organisasi dan berpengaruh terhadap penentuan strategi ekonomi daerah adalah koordinasi.¹⁰⁸ Koordinasi dilakukan dengan *stakeholder* selaku pelaksana implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia baik itu dalam hal

¹⁰⁷ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

¹⁰⁸ Alwi, “Analisis Tentang Sistem Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Pare-Pare-Sulsel)” (Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007), 4.

pengambilan keputusan terutama pemilihan materi atau pengembangan apa yang akan diberikan kepada UMKM maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hafidz Yudhansyah selaku PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember mengatakan bahwa:

“Koordinasinya dalam bentuk pertemuan dengan *stakeholder* terkait mengenai pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangannya, yang mana dalam hal ini ada pembagian tugas. *Stakeholder* Yukbisnis bertugas untuk membuat pelatihan baik itu yang bersifat pengetahuan maupun keterampilan dan membantu UMKM dalam membentuk manajemen usaha, sedangkan *stakeholder* GenBI Jember bertugas untuk memberikan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan, sementara itu Bank Indonesia sendiri bertugas dalam membantu pengadaan peralatan produksi serta membantu memperluas akses pemasaran melalui *business matching*.”¹⁰⁹

b) Perilaku Organisasi Level Bawah (*Street Level Bureaucracy Behavior*)

Salah satu faktor untuk memahami implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember adalah perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi adalah kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal.

¹⁰⁹ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yang dimaksudkan disini adalah kemampuan *stakeholder* Yukbisnis dan GenBI Jember dalam menjalankan program pengembangan UMKM di Kabupaten Jember. Kemampuan *stakeholder* Yukbisnis dan GenBI Jember sebagai implementor sudah menjadi ketetapan dalam implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Yukbisnis sebagai berikut:

“Sebagai *stakeholder*, kami telah mengimplementasikan secara diskresi program pengembangan UMKM di Kabupaten Jember melalui kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Alangkah senangnya kami karena dalam pelaksanaannya semua pihak dapat bekerjasama, baik dari pihak Bank Indonesia maupun dari pihak *stakeholder* yang terlibat untuk pengembangan UMKM ini. Proses pengembangannya seperti kita mengadakan kelas edukasi ataupun *workshop* kewirausahaan mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik dan benar misalnya tentang pelatihan bisnis berkala, pendampingan bisnis berkala, *rebranding*, *repacking*, *repositioning* dan lain sebagainya. Kami berharap agar para UMKM ini mampu untuk merubah *mindset* berwirausaha sehingga nantinya akan menjadi lebih baik”¹¹⁰

Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak GenBI Jember, yang mengatakan:

“Selama menjalankan usaha dari tahun ke tahun pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan keuangan yang sangat sederhana dengan alasan terlalu rumit kalau menggunakan pencatatan keuangan yang rinci. Maka dari itu kita memberikan bantuan atau pendampingan tentang proses pencatatan keuangan yang baik dan benar. Kami melaksanakan program pengembangan UMKM yang digagas oleh Bank Indonesia sesuai dengan tugas yang diberikan, disamping itu program ini juga selaras dengan tujuan dari terbentuknya GenBI yaitu sebagai *frontliners* Bank Indonesia”¹¹¹

¹¹⁰ Eko Nuryahya, *Wawancara*, Jember, 31 Desember 2021.

¹¹¹ Olivia Salsabilla, *Wawancara*, Jember, 31 Desember 2021.

c) Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Group Behavior*)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember adalah perilaku UMKM sasaran, dimensinya yaitu respon positif dan respon negatif.

Perilaku UMKM sasaran meliputi respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan UMKM sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku Pemilik UMKM Afa Choco and Snack, yang mengatakan bahwa:

“Respon saya mengenai program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia ini, saya sangat merespon dengan baik karena Bank Indonesia masih peduli dengan kami para pelaku UMKM, secara tidak langsung Bank Indonesia telah membantu perekonomian masyarakat dan Bank Indonesia telah mengarahkan serta memperlihatkan bagaimana proses pengembangan UMKM yang berpotensi di Kabupaten Jember. Namun dalam kegiatan temu bisnis yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, saya masih belum berani untuk meminjam modal lebih kepada perbankan karena takut prosesnya rumit.”¹¹²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yusron selaku Manajer UMKM KSU Buah Ketakasi sebagai berikut:

“Program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia ini memberi manfaat yang nyata bagi kami para petani kopi. Utamanya tentang pelayanan sertifikasi halal, pelayanan pembuatan QRIS, kegiatan yang berhubungan dengan *upgrade skill* berupa pencatatan keuangan, serta pelaksanaan kegiatan *business matching* walaupun dalam kegiatan tersebut kami tidak tertarik untuk mendapatkan permodalan dari perbankan karena kami hanya fokus pada perluasan pasar. Adapun respon positif dari semua ini

¹¹² Ibu Farida, *Wawancara*, Jember, 3 Januari 2022.

kami sebagai pelaku UMKM mendapatkan kemudahan akses pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Sedangkan respon negatif mungkin perlu sedikit meningkatkan intensitas terkait pemberian bimbingan pencatatan keuangan usaha.”¹¹³

Keterangan yang serupa diungkapkan oleh Bapak Sutrimo selaku Ketua Kelompok Tani Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur bahwa:

“Kami sebagai petani merasa bersyukur mendapatkan bimbingan dari Bank Indonesia di bidang pertanian tanaman holtikultura, dengan mendapatkan banyak informasi tentang teknologi pertanian modern, kami dapat meningkatkan produksi dan Alhamdulillah hasil produksi pertanian kami sangat membantu pendapatan rumah tangga. Untuk itu respon positif dari program ini adalah kami dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta kami juga mendapatkan bantuan transportasi berupa mobil L-300 sehingga kami dapat menekan biaya pengeluaran, sedangkan respon negatifnya masih perlu peningkatan frekuensi dalam pendampingan pencatatan keuangan usaha dan juga kami tidak mengambil tawaran tambahan modal dari perbankan karena apabila membutuhkan tambahan modal maka kami lebih memprioritaskan untuk meminjam ke tetangga atau keluarga dekat saja dengan proses yang mudah dan tidak terlalu rumit.”¹¹⁴

2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Jember

Untuk dapat mengatakan efektif atau tidaknya implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember maka peneliti melihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.¹¹⁵ Sesuai dengan indikator-indikator tersebut maka peneliti

¹¹³ Bapak Yusron, *Wawancara*, Jember, 4 Januari 2022.

¹¹⁴ Bapak Sutrimo, *Wawancara*, Jember, 5 Januari 2022.

¹¹⁵ Ahmad Wito Subagyo, “Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan”, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000), 53.

membuat instrumen wawancara kepada pihak Bank Indonesia, *stakeholder* terkait dan sasaran UMKM yang mendapatkan bantuan serta pendampingan pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial. Sehingga dari hasil wawancara nanti dapat diketahui efektif atau tidaknya kebijakan makroprudensial dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jember tersebut. Berikut penjelasan dan hasil dari wawancara peneliti

a) Ketepatan sasaran program

Sasaran program merupakan target atau sasaran dari Bank Indonesia yang hendak dijadikan sebagai UMKM binaan di Kabupaten Jember, dengan maksud melalui kebijakan makroprudensial ini UMKM dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Subagyo, ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹¹⁶

Dalam penelitian ini ketepatan penentuan siapa saja sasarannya disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berikut pemaparan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember:

“Kita melihat kriteria UMKM terlebih dahulu yang termasuk ke dalam tugas-tugas Bank Indonesia. Misalnya pertama, terkait pengendalian inflasi UMKM yang berkaitan berarti UMKM *volatile food* yang berhubungan dengan komoditas pangan, dalam

¹¹⁶ Ibid.,53.

hal ini Bank Indonesia dapat membantu pendampingan terkait dengan bagaimana caranya produktivitasnya bisa naik ataupun biaya *cost* produknya lebih efisien sehingga nantinya komoditas-komoditas pangan itu harganya bisa terkendali, itu merupakan salah satu contoh UMKM yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia serta bertujuan untuk mengendalikan kestabilan harga rupiah terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Kemudian yang kedua, ada pengembangan UMKM yang memiliki potensi ekspor karena melalui ekspor kita dapat memperbaiki CAD (*current account deficit*) agar supaya ekspornya lebih tinggi daripada impor, kalau misalnya ekspor kita lebih tinggi otomatis nilai tukar rupiah kita punya *bargaining power* yang lebih tinggi, kalau misalnya impornya lebih dari ekspor berarti defisit maka dari itu kita mendorong UMKM yang memiliki komoditas-komoditas potensi ekspor. Selanjutnya yang ketiga, kita mendukung UMKM untuk pengembangan ekonomi lokal (*local economy development*) yang memang komoditas lokal itu bagus dan bisa untuk mengembangkan ekonomi daerah itu, biasanya juga bersinggungan dengan ekspor dan juga pariwisata. Dari semua itu ujung-ujungnya adalah bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, maka dari itu kita identifikasi dahulu terkait komoditasnya, jadi tidak semua UMKM kita bina, pasti yang dilakukan juga berkaitan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara dan teori mengenai ketepatan sasaran program, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya ketepatan sasaran implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ini semua terlihat dari kesesuaian antara UMKM yang dibina dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.

¹¹⁷ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

b) Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Subagyo mengatakan bahwa sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.¹¹⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sosialisasi program adalah kemampuan Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember kepada masyarakat yang mempunyai UMKM. Berikut pernyataan dari PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember:

“Kami mensosialisasikan kebijakan makroprudensial untuk pengembangan UMKM ini melalui kelompok-kelompok UMKM yang sudah terbentuk di masyarakat, disamping itu juga kami bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mencari UMKM-UMKM yang mempunyai potensi. Dari situlah UMKM tersebut mengetahui informasi tentang kebijakan ini, namun balik lagi tidak semua UMKM kita bina, hanya UMKM yang sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan terlebih dahulu.”¹¹⁹

Selanjutnya yaitu pendapat dari UMKM yang sedang atau telah memperoleh binaan dari Bank Indonesia terkait dengan

¹¹⁸ Subagyo, *Efektivitas*, 53.

¹¹⁹ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

pengembangan UMKM melalui kebijakan makroprudensial tersebut:

“Saya tahu bahwa Bank Indonesia mempunyai kebijakan pengembangan UMKM ini melalui informasi-informasi yang telah disebarluaskan oleh kelompok UMKM dan alhamdulillah UMKM saya termasuk sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.”¹²⁰

Informasi yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Yusron selaku

Manajer UMKM KSU Buah Ketakasi sebagai berikut:

“Kami mengetahui program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia ini langsung dari pihak Bank Indonesia sendiri, dan saya sangat tertarik untuk bergabung karena saya ingin kelompok petani kopi disini dapat berkembang dan lebih sejahtera kehidupannya.”¹²¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Sutrimo selaku Ketua Kelompok Tani Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur sebagai berikut:

“Saya mengetahui program ini melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jember, informasi yang disampaikan terkait dengan adanya program pengembangan UMKM melalui kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia, kemudian dari pihak Bank Indonesia juga sempat datang ke tempat kami untuk menyampaikan informasi yang sama.”¹²²

Dari pernyataan pihak PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia, pihak UMKM dan berdasarkan teori mengenai sosialisasi program, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya sosialisasi dari pihak Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember sudah dilakukan dengan baik karena pihak Bank

¹²⁰ Ibu Farida, *Wawancara*, Jember, 3 Januari 2022.

¹²¹ Bapak Yusron, *Wawancara*, Jember, 4 Januari 2022.

¹²² Bapak Sutrimo, *Wawancara*, Jember, 5 Januari 2022.

Indonesia selain melalui pemerintah setempat juga terjun langsung ke UMKM yang ada di masyarakat supaya dapat mengetahui adanya program pengembangan UMKM melalui kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

c) Pencapaian tujuan sasaran

Tujuan merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan. Menurut Subagyo, tujuan program adalah mengukur sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²³

Dalam penelitian ini, kaitannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil dari implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan makroprudensial dalam pengembangan UMKM ini ditujukan untuk mencapai peningkatan akses keuangan UMKM.¹²⁴ Berikut pernyataan dari PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember:

“Tujuannya yang jelas untuk mendukung UMKM agar mendapatkan akses keuangan yang baik. Dalam rangka mendukung UMKM ini kami telah melakukan berbagai macam upaya. Pertama, upaya untuk meningkatkan pembiayaan dan akses keuangan bagi UMKM terus kami lakukan dengan memperkuat instrumen kebijakan makroprudensial dalam mendorong penyaluran kredit UMKM, upaya ini berkaitan dengan kewajiban perbankan untuk memenuhi rasio kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, untuk mendorong tercapainya target rasio kredit UMKM ini kami

¹²³ Subagyo, *Efektivitas*, 54.

¹²⁴ Bank Indonesia, “*Laporan Perekonomian Indonesia 2017: Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur*”, 136.

juga menyediakan fasilitas *business matching* yang dimana dalam kegiatan itu kami mempertemukan antara lembaga keuangan perbankan, *fintech*, ataupun perusahaan pembiayaan dengan UMKM sekaligus *buyer* dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun sayangnya dalam *business matching* ini kami masih belum menjalankannya secara maksimal dapat ditunjukkan dengan belum adanya ketertarikan UMKM untuk memperoleh tambahan modal dari perbankan. Kedua, untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM, kami juga mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) yang sangat mudah untuk diakses UMKM. Ketiga, kami juga memfasilitasi untuk perluasan akses pemasaran dengan menyelenggarakan pameran bagi UMKM baik secara *offline* maupun *online*.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan teori mengenai pencapaian tujuan program, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember ini belum terpenuhi semuanya.

d) Pemantauan program

Menurut Subagyo, pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.¹²⁶ Pemantauan program yang dimaksud disini yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia beserta dengan *stakeholder* terkait pada implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada UMKM yang dibina.

Berikut pernyataan dari PIC Fungsi Pelaksana dan Pengembangan

¹²⁵ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

¹²⁶ Subagyo, *Efektivitas*, 54.

UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember mengenai pemantauan yang dilaksanakan:

“Kami terus melakukan pengawasan terhadap program yang telah dilaksanakan, bahkan bukan hanya programnya saja yang kami awasi tetapi juga perilaku UMKM serta *stakeholder* yang mendampingi UMKM. Serta dalam rangka pengawasan program dan UMKM ini kami dibantu juga oleh *stakeholder*.”¹²⁷

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari *Entrepreneur Practitioner* Yukbisnis bahwa:

“Kami sudah melaksanakan pengawasannya sesuai dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dari Yukbisnis”¹²⁸

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Koordinator *Implementing Partner* GenBI Jember bahwa:

“Kami selalu melakukan pengawasan kepada UMKM, setiap bulan kami terus membuat laporan kepada Bank Indonesia salah satunya sebagai bahan untuk evaluasi dari program yang dilaksanakan”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan teori mengenai pemantauan program, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember sudah dilaksanakan oleh Bank Indonesia beserta *stakeholder* terkait, ini semua dapat dilihat dari adanya laporan yang dibuat setiap bulannya yang nantinya laporan tersebut akan diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bahan evaluasi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan

¹²⁷ Hafidz Yudhansyah, *Wawancara*, Jember, 30 Desember 2021.

¹²⁸ Eko Nuryahya, *Wawancara*, Jember, 31 Desember 2021.

¹²⁹ Olivia Salsabilla, *Wawancara*, Jember, 31 Desember 2021.

yang telah dipilih selama penelitian berlangsung, selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangan dengan disertai metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang didasari dan disesuaikan dengan teliti dan seksama dengan fokus penelitian yang disusun dan dirumuskan oleh peneliti, yang nantinya akan disajikan melalui pembahasan temuan.

Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan mengenai efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan parameter yang disampaikan oleh regulasi dan teori dalam meningkatkan akses keuangan UMKM baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Dari sisi permintaan, parameter yang dimaksud yaitu: Bantuan teknis berupa pelatihan, baik itu dalam bentuk pelatihan wacana (*knowledge based training*) maupun pelatihan keterampilan (*skill based training*); Pembentukan manajemen usaha; Bantuan peralatan produksi; Serta temu bisnis antara perbankan dengan UMKM. Sedangkan dari sisi

penawaran, parameter yang dimaksud yaitu alokasi minimum 20% dari total kredit perbankan untuk UMKM baik berupa kredit langsung, maupun kredit tidak langsung melalui *executing*, *channeling*, dan sindikasi.¹³⁰ Namun pada sisi penawaran, parameter tersebut masih belum terpenuhi semuanya dikarenakan pihak UMKM belum mempunyai ketertarikan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan dikarenakan adanya anggapan bahwa mendapatkan modal dari perbankan birokrasinya susah.

2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Jember

Dalam periode penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kinerja dari implementasi kebijakan makroprudensial terutama pada sisi permintaan. Terdapat berbagai macam bantuan yang diberikan oleh *stakeholder* berupa bantuan teknis dan bantuan pembentukan manajemen usaha, serta bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa peralatan produksi serta fasilitas temu bisnis.¹³¹ Namun dari sisi penawaran, tidak menunjukkan adanya peningkatan dalam alokasi minimum 20% dari total kredit perbankan untuk UMKM baik berupa kredit langsung, maupun kredit tidak langsung melalui *executing*, *channeling*, dan sindikasi. Sementara itu pada penelitian ini juga terdapat

¹³⁰ Bank Indonesia. "Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi", 118.

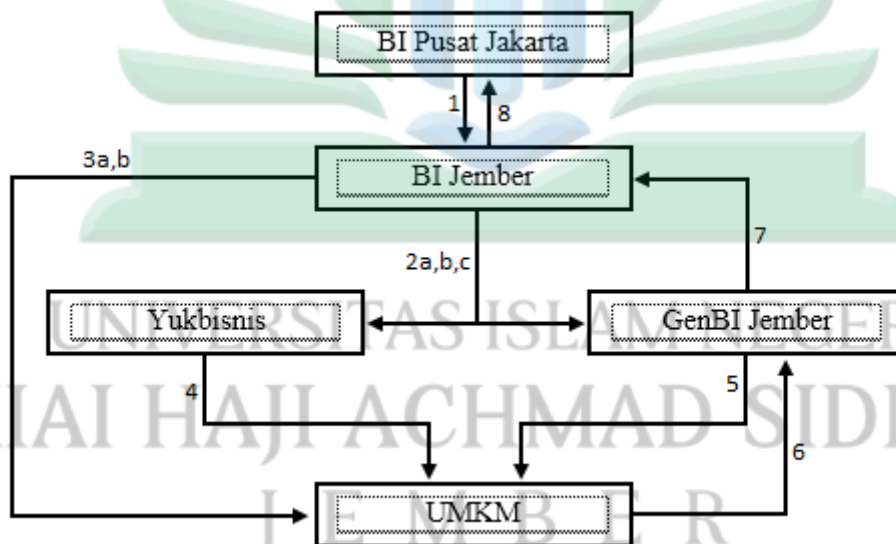
¹³¹ Ibid., 118.

ketepatan sasaran serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM.

3. Skema Kebijakan Makroprudensial Dari Bank Indonesia Pusat Jakarta Hingga Bank Indonesia Jember

Skema kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ini mendefinisikan secara rinci bagaimana fungsi dan posisi pada bagian-bagian yang ada. Serta menjelaskan hubungan antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, hingga penerima kebijakan. Berikut ini merupakan skema kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember.

Gambar 4.1
Skema Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia



Sumber: Data hasil wawancara dan diolah oleh penulis

Keterangan:

No	Alur Kegiatan	
1	Mengintruksikan BI Jember untuk mengimplementasikan kebijakan makroprudensial.	
2	a	Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> untuk mengembangkan UMKM.
	b	Membagi tugas antara BI Jember dan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kapasitas masing-masing.
	c	Melakukan pengawasan terhadap <i>stakeholder</i> .
3	a	BI Jember membantu pengadaan peralatan produksi serta membantu memperluas akses pemasaran melalui <i>business matching</i> .
	b	Melakukan pengawasan terhadap UMKM.
4	Yukbisnis mengadakan <i>workshop</i> kewirausahaan berupa pelatihan bisnis berkala, pendampingan bisnis berkala, <i>rebranding</i> , <i>repacking</i> , <i>repositioning</i> , dan membantu membentuk manajemen usaha.	
5	GenBI Jember memberikan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.	
6	UMKM melakukan pelaporan keuangan.	
7	GenBI Jember melakukan pelaporan hasil kegiatan untuk di evaluasi.	
8	BI Jember melakukan pelaporan untuk umpan balik dari implementasi kebijakan makroprudensial.	

4. Komparasi antara Penelitian Terdahulu dan Temuan Di Lapangan

Peran Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai macam kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut merupakan tabulasi yang mengkomparasi antara penelitian terdahulu dan temuan di lapangan terkait dengan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia:

Tabel 4.6
Komparasi Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan

	Penelitian Terdahulu	Temuan Lapangan
Masalah	Perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai permasalahan, diantaranya permasalahan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, masalah pemasaran, masalah perizinan, terbatasnya sarana prasarana serta rendahnya minat beli masyarakat.	Permasalahan yang dihadapi UMKM dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi internal, faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor penghambatnya adalah iklim usaha yang tidak sepenuhnya kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, implikasi otonomi daerah, sifat produk yang berumur pendek, akses pasar yang terbatas dan implikasi perdagangan bebas.
Program yang digunakan	CSR. Hal ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.	Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM. Bank Indonesia mendukung pengembangan UMKM melalui sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis, termasuk memfasilitasi temu bisnis antara bank dengan UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan. Dari sisi penawaran, Bank Indonesia menetapkan peraturan tentang rasio kredit UMKM dalam PBI No. 17/12/PBI/2015, yaitu bank umum wajib mengalokasikan sebesar minimum 20% dari total kredit untuk UMKM.

Penerapan Program	Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah wujud penerapan CSR Bank Indonesia. Strategi yang dilakukan antara lain adalah memberikan modal sarana prasarana, edukasi atau <i>training, controlling</i> (pengawasan), <i>packaging</i> (kemasan) dan <i>marketing</i> (pemasaran).	Bank Indonesia memberikan bantuan termasuk memfasilitasi <i>business matching</i> dan membantu pengadaan beberapa peralatan produksi. Yukbisnis membantu dalam Pelatihan wacana (<i>knowledge based training</i>), Pelatihan keterampilan (<i>skill based training</i>), dan membantu Membentuk manajemen usaha. Serta GenBI Jember membantu dalam pendampingan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut juga dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu: bentuk komitmen antarorganisasi berupa komitmen tertulis, koordinasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan, adanya kemampuan Yukbisnis dan GenBI Jember dalam menjalankan perannya sebagai <i>implementor</i> , serta adanya respon positif dan negatif yang ditunjukkan oleh UMKM.
-------------------	--	---

Sumber: Diolah dari data hasil wawancara dan penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini terdapat adanya kesesuaian dengan penelitian terdahulu yaitu skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap Program UMKM untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” oleh Cut Leni Narisyah. Kesesuaian tersebut terdapat dalam penerapan program berupa pelatihan wacana (*knowledge based training*), pelatihan keterampilan (*skill based training*), serta dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan makroprudensial tersebut sejalan dengan kajian teori dari kebijakan makroprudensial untuk pengembangan UMKM serta sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan parameter yang disampaikan oleh regulasi dan teori dalam meningkatkan akses keuangan UMKM baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jember belum berjalan efektif, dikarenakan pada sisi penawaran parameter yang ditetapkan belum terpenuhi semuanya yang disebabkan oleh pihak UMKM belum mempunyai ketertarikan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa solusi yang disarankan peneliti, yakni:

1. Dengan terbatasnya jumlah UMKM yang tergabung dalam UMKM binaan Bank Indonesia, maka bagi Bank Indonesia diharapkan dapat

memperbanyak jumlah UMKM binaan agar dapat membantu mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dengan lebih maksimal, namun UMKM yang direkrut tetap sesuai dengan kriteria UMKM yang ditetapkan.

2. Bagi *stakeholder* diharapkan agar dapat meningkatkan hubungan komunikasi dengan UMKM yang dibina agar UMKM lebih bisa memahami dampak positif dari mengembangkan usahanya untuk internal maupun eksternal UMKM, serta dapat meningkatkan frekuensi dalam proses pendampingan usaha, terutama terkait dengan pencatatan keuangan.
3. Bagi UMKM diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia melalui berbagai program pengembangan usaha ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar usahanya dapat berkembang serta dapat membantu tujuan dari Bank Indonesia.
4. Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak dan desain yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Agung, Juda, Cicilia A. Harun, dan Elis Deriantino. *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1 (2010): 1-11.
- Alwi. "Analisis Tentang Sistem Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Pare-Pare-Sulsel)". Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2007.
- Anisah, Aan. "Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial Dalam Mengurangi Risiko Kredit di Indonesia". Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Ardely, Novrianti Putri. "Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia". Skripsi, Universitas Trisakti, 2016.
- Arifin, Zaenal. "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial LTV Pada *Risk Taking Behaviour* Perbankan Indonesia (Implementasi LTV Pada NPL Properti BUK Tahun 2011-2017)". Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Azis, Abdul, dan Herani Ruslan. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2009.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2017: Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Beck, Thorsten, Asli Demirguc-Kunt, dan Ross Levine. "SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence". *Journal of Economic Growth*, Vol. 10 No.3 (2005): 199-229.

- Budiarto, Rachmawan. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Departemen Kebijakan Makroprudensial. *Mengupas Kebijakan Makroprudensial*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Deutsche Bundesbank. *Monthly Report-December 2003: Report On The Stability of The German Financial System*, 2003.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- European Central Bank. *Financial Stability Review June 2012*, 2012.
- Fahrudin. "Analisis Peran Program UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Hadiyati, Ernani. "Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil". *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 1 (2011): 8-16.
- Khairunnisa, Aliya. "Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Kurniawan, Mahrus Luti Adi. "Risiko Kredit Dan Kebijakan Makroprudensial Perbankan Di Indonesia: Pendekatan Makro Stress-Testing (Periode 2009:Q1-2017:Q4)". Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015.
- Lestari, Oni, dan Hendra Wijayanto. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani". *Jurnal of Political Issues*, Vol. 3 No. 2 (2022): 101.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mardikanto, Toto, dan Soebianto Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat". *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 3 No. 1 (2014): 1-17.
- Masruri dan Imam Muazansyah. "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)". *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4 No. 2 (2017): 364-393.
- Narisyah, Cut Leni. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia Provinsi Aceh terhadap Program UMKM untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Novianti, Dwi Indri. "Analisis Indeks Harga Properti Resedensial (IHPR), Suku Bunga Kredit, dan Instrumen Makroprudensial *Loan To Value* Terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Periode 2012-2019". Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011.
- Rahmawati, Dinar Putri. "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, dan Dian Marlina Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa". *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4 No. 2 (2019): 137-146.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Schoenmaker, Dirk, dan Peter Wierts. "Macroprudential Supervision: From Theory to Policy". European Systemic Risk Board (ESRB): Working Paper Series, No. 2, 2016.
- Steers, Richard M. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Subagyo, Ahmad Wito. *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000.

- Sugiana, Puji Meilita. "Implementasi Kebijakan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan". Tesis, Universitas Indonesia, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulila, Ismet. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Suryana. *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Susilo, Yuvensius Sri. "Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY". *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 14 No. 3 (2010): 467-478.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Warjiyo, Perry, dan Solikin M. Juhro. *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004.
- Winardi. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Internet/Website

Bank Indonesia. “Pengembangan UMKM”. 2020. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. “Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2018” 2018. <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>.

Kementerian Koperasi dan UKM. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”. 2019. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

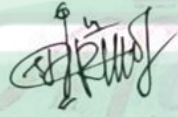
JURNAL PENELITIAN

Nama : Ilham Maulana

NIM : E20172152

Judul : Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember

Lokasi : Kabupaten Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	29 Desember 2021	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian Kepada Pihak Bank Indonesia Jember (Bapak M. Arif W Akbar)	
2	30 Desember 2021	Melakukan Wawancara dengan Bapak Hafidz Yudhansyah	
3	31 Desember 2021	Melakukan Wawancara dengan Bapak Eko Nuryahya	
4	31 Desember 2021	Melakukan Wawancara dengan Saudari Olivia Salsabilla	
5	03 Januari 2022	Melakukan Wawancara dengan Ibu Farida	
6	04 Januari 2022	Melakukan Wawancara dengan Bapak Yusron	
7	05 Januari 2022	Melakukan Wawancara dengan Bapak Sutrimo	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana

NIM : E20172152

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Institusi/Fakultas : UIN KHAS Jember/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL BANK INDONESIA PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 17 Juni 2022

Saya yang mengajukan



Ilham Maulana
E20172152



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-755/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2021 23 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Kpw Bank Indonesia Jember
Jl. Gajah Mada No.224, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ilham Maulana
NIM : E20172152
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prayogo Mulyo Utomo

Jabatan : Analis

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ilham Maulana

NIM : E20172152

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember”.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2022

**KANTOR PERWAKILAN
BANK INDONESIA JEMBER**



Prayogo Mulyo Utomo
Manajer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Gambar wawancara bersama Bapak Hafidz Yudhansyah selaku *Person in Charge* (PIC) Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jember



Gambar bersama Bapak Eko Nuryahya selaku *Entrepreneur Practitioner* dan Koordinator Yukbisnis Jember



Gambar wawancara bersama Saudari Olivia Salsabilla selaku *Implementing Partner* GenBI Jember



Gambar bersama Ibu Farida selaku Pemilik Usaha UMKM Afa Choco and Snack



Gambar bersama Bapak Yusron selaku Manajer UMKM KSU Buah Ketakasi



Gambar bersama Bapak Sutrimo selaku Ketua Kelompok Tani UMKM Binamitra Usahatani Holtikultura Multiagro Makmur

BIODATA



Nama : Ilham Maulana
NIM : E20172152
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 Desember 1997
Alamat : Dusun Cangaan RT 01 RW 07 Desa Genteng Wetan
Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Riwayat Pendidikan : TK Al-Ihsan
MI Al-Ihsan
MTs Kebunrejo
MAN Genteng

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R